

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PEMBAGIAN KOMISI
PADA APLIKASI PAYTREN**

**(Studi Kasus pada pengguna Paytren Kecamatan Sukarame Bandar
lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

**SITI ROHMAWATI
NPM: 1421030244**

Program Studi: Mu'amalah



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PEMBAGIAN KOMISI
PADA APLIKASI PAYTREN**

**(Studi Kasus pada pengguna Paytren Kecamatan Sukarame Bandar
lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

SITI ROHMAWATI

NPM: 1421030244

Program Studi: Mu'amalah

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S. Ag, M. Ag.

Pembimbing II : Badruzaman, S. Ag. M. H. I

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Pemasaran dengan menggunakan sistem jaringan atau sering disebut Multi Level Marketing (MLM) saat ini menjadi tren pemasaran diberbagai perusahaan, baik dalam bidang barang ataupun jasa. Sistem ini merupakan sistem penjualan langsung berjenjang yang menawarkan kemudahan untuk mendapatkan financial yang lebih dengan sistem perekrutan dan pembinaan kepada *downline* sehingga menciptakan sistem duplikasi yang berkelanjutan.

PT Veritra Sentosa Internasional adalah sebuah bisnis dengan sistem network marketing. Jenis usaha Veritra Sentosa Internasional yaitu penjualan “lisensi” Aplikasi/Software/Tekhnologi (Paytren). Veritra Sentosa Internasional memiliki beberapa komisi yaitu komisi sponsor (komisi penjualan langsung), komisi Leadership, komisi generasi (sponsor), komisi generasi Leadership) dan komisi cashback transaksi. Perusahaan didirikan pada tanggal 10 juli 2013 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.47 oleh Notaris/PPAT H.Wira Francisca, SH., MH. Perusahaan ini didirikan langsung oleh pemilik perusahaan yaitu Ustadz Yusuf Mansur.

Yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana praktek pembagian komisi pada mitra paytren dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) di PT.Veritra Sentosa Internasional pada pengguna aplikasi/ mitra Paytren lampung serta tinjauan hukum Islam dalam praktek menjalankan bisnis aplikasi Paytren menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) di PT. Veritra Sentosa Internasional pada pengguna aplikasi/mitra paytren Kecamatan Sukarame Bandar lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bisnis *Multi Level Marketing*. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah interview dan observasi sebagai metode utama. Sedangkan dalam analisa data menggunakan analisa kualitatif dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Dalam praktek pembagian komisi yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) Paytren kecamatan Sukarame Bandar lampung, bahwa hukum Islam memandang persoalan tentang bagi hasil aplikasi Paytren yaitu diperbolehkan karena dalam bentuk kegiatan dan unsur-unsur perikatan terdapat pada akan perjanjian yang cukup jelas dan melakukan akad *ji'alah* yang sesuai. Namun demikian ternyata ada kesenjangan hukum Islam dengan pelaksanaannya dan masih ada akad yang masih belum terpenuhi serta pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak sehingga memerlukan akad/perjanjian yang lebih jelas lagi. Dalam praktek ini kebanyakan dari mereka untuk memperoleh komisi hanya menitik beratkan pada *downline* nya saja untuk menjual lisensi atau merekrut mitra baru dan tidak memasarkan produk yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut dan *upline* tidak memberikan bimbingan kepada *downline* yang telah mendaftarkan lewat mitra tersebut. Hal ini cenderung akan merugikan salah satu pihak karena tidak ada binaan dari *upline*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM
PEMBAGIAN KOMISI PADA APLIKASI PAYTREN
(Studi Kasus pada pengguna Paytren Kecamatan
Sukarame Bandar Lampung)**

Nama : **SITI ROHMAWATI**
NPM : **1421030244**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Mu'amalah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Alamsyah, S. Ag. M. Ag.
NIP.197009011997031002


Badruzaman, S. Ag. M. H. I.
NIP.196806241997031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah


Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M. H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PEMBAGIAN KOMISI PADA APLIKASI PAYTREN** (Studi Kasus pada pengguna Paytren Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung) disusun oleh **SITI ROHMAWATI, NPM. 1421030244, Jurusan Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 17 September 2018.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Yufi Wiyosrini Masykuroh, M.Si.

(.....)

Sekretaris : Kartika S, S.Pd, M.Pd.

(.....)

Penguji I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700901199703100**

MO TTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

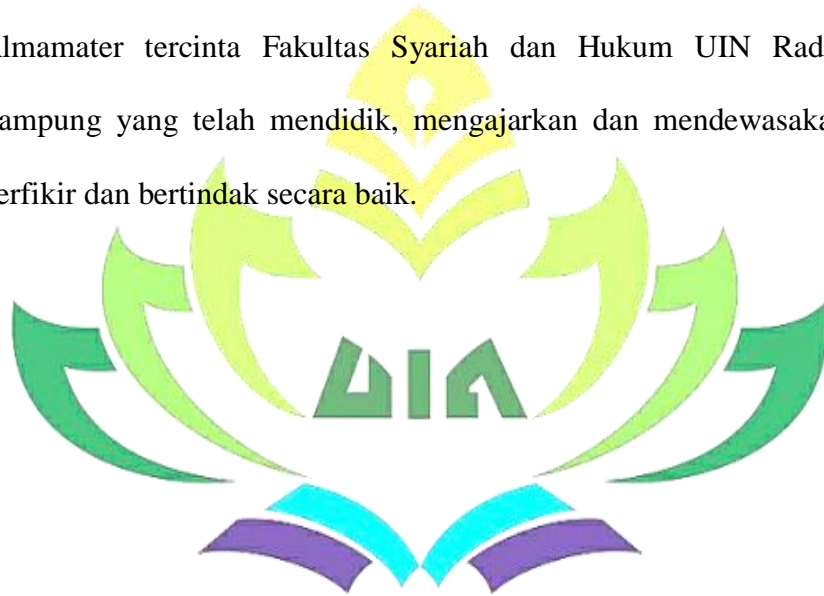


¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010, hlm.83

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Kuwatno dan Ibunda Darti, atas ketulusan, didikan, kasih sayang serta doa restu yang tiada hentinya untuk keberhasilanku.
2. Kakak-kakakku Masduki dan Saiful Amri yang selalu memberikan semangat yang luar biasa, serta selalu memberikan pertolongan dengan ikhlas penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Siti Rohmawati. Dilahirkan pada tanggal 27 Desember 1995 di kecamatan Talang padang, kabupaten Tanggamus. Putri bungsu dari tiga bersaudara, buah cinta pasangan Bapak Kuwatno dengan ibu Darti.

Riwayat pendidikan:

1. SDN2 Talang padang, kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus, sejak 2002-2008
2. MTSN model Talang padang, Kecamatan Talang padang, kabupaten Tanggamus, sejak tahun 2008-2011.
3. MAN1 Pringsewu, kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sejak tahun 2011-2014.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dan Hukum mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), sejak tahun 2014-2018.



KATA PENGHANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at-nya* pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PEMBAGIAN KOMISI PADA APLIKASI PAYTREN” (Studi Kasus pada pengguna Paytren Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung), skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Islam Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag, M.H. selaku ketua jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.Si. selaku Sekretaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag dan Badruzaman, S. Ag. selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikiran serta bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Tim penguji skripsi, Yufi Wiyosrini Masykuroh, M.Si. selaku ketua sidang, Drs. H. Haryanto H., M.H. selaku penguji I, Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag. selaku penguji II, dan Kartika S, S.pd, M.Pd. selaku sekretaris sidang.
6. Bapak dan ibu dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Pihak perusahaan PT. VSI dan Mitra Paytren kecamatan sukarampe Bandar lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Sahabat terbaikku sejak menjadi mahasiswa baru sampai menyelesaikan kuliah, Umi Nurrohmah, Yulia Dinda Pertiwi, Mutiara Awaliah, Nugraheni Fajar Prastiwi, Desi zelviah, Tria Kusuma Wardani, yang selalu setia membimbing, menasehati, mengingatkan dan memberi semangat tanpa pamrih.

9. Almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Semoga semua amal ibadah dan kebaikan yang telah diperbuat akan mendapat ridho dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Amin ya Robal'Alamin.

Bandar lampung, 29 Agustus 2018

Siti Rohmawati

NPM: 1421030244



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II SISTEM BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARI'AH	
A. Pengertian Bagi Hasil.....	15
B. Dasar Hukum Bagi Hasil	23
C. Bentuk Bentuk Bagi Hasil.....	28
D. Macam-macam Akad/ Produk Bisnis yang Menggunakan Bagi Hasil	32
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Pengertian Paytren dan Sejarah Paytren	48
C. Sistem Operasional Paytren dan Bagi Hasil Paytren.....	54
D. Sistem Bagi Hasil di Kalangan Pemakai Paytren Kecamatan Sukarame Bandar Lampung	61
E. Kelebihan dan Kekurangan Kepada Anggota Paytren di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.....	67

BAB IV ANALISA DATA

- A. Peraktek Pembagian Komisi pada Pengguna Aplikasi Paytren 74
- B. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Sistem Pembagian Komisi pada Pengguna Aplikasi Paytren 78

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 84
- B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini bagi para pembaca, maka sebaiknya diuraikan secara singkat dan dijelaskan makna istilah yang digunakan dalam judul ini, judul skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PEMBAGIAN KOMISI PADA APLIKASI PAYTREN”

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

2. Hukum Islam

Menurut Amir Syaifuddin, Hukum Islam adalah Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, dan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam². Sedang menurut Abdul Wahab Kholaf, Hukum Islam adalah peraturan yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

yang mengandung tuntutan, kebolehan memilih atau meninggalkan sesuatu.³

3. Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁴ Menurut beberapa ahli yaitu, Menurut Tata Sutabri (2012:6) pada buku Analisis Sistem Informasi, pada dasarnya sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Komisi

Komisi merupakan sistem bonus yang dibayarkan kepada pihak yang menghasilkan penjualan yang baik dan melebihi target. Lazimnya dibayarkan sebagai bagian dari penjualan dan diberikan kepada karyawan dibagian penjualan.⁵ Komisi juga dapat diartikan sebagai imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli.⁶

5. Paytren

Paytren adalah Aplikasi/Software/Perangkat Lunak/Teknologi yang dapat digunakan pada semua jenis Smartphone khususnya Android, agar dapat melakukan transaksi/pembayaran seperti halnya ATM,

³ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Al-Jami'atul-Kairo Mesir,tt),hlm. 100

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 1028

⁵ Sarwono, *Dasar-dasar Organisasi dan manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), h.155.

⁶ *Ibid*, h. 718.

Internet/SMS/Mobile Banking, PPOB (Payment Point Online Bank) dan hanya berlaku di lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang sistem pembagian komisi pada aplikasi Paytren. Dalam permasalahan tersebut meninjau pembagian komisi pada aplikasi Paytren yang akan diteliti menurut hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pembagian Komisi pada Aplikasi Paytren” ini yaitu:

1. Alasan Objektif, Sudah banyak masyarakat yang menjalankan bisnis dengan menggunakan sistem MLM (Multi Level Marketing) yaitu suatu bisnis dengan sistem pemasaran produk secara bertingkat, yang apabila masuk ke dalamnya, akan diajarkan, dibimbing, dan diarahkan bagaimana cara berbisnis yang benar, tidak sulit dan mendapat keuntungan.

Karena sebagian besar MLM untuk mendapatkan komisinya hanya menitik beratkan pada perolehan *downline* dan tidak mementingkan produk. Karena itulah dalam MLM yang menerapkan sistem ini, member yang bisa mendatangkan banyak *downline* namun sedikit membeli produk, dinilai lebih produktif dibandingkan member yang banyak membeli produk, namun tidak memiliki *downline*.

2. Alasan Subjektif, penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan

Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam ilmu pengetahuan, dimana kajian muamalah yaitu dengan ditinjau dari Hukum Islamnya.

C. Latar Belakang Masalah

Pada era ini, jaringan-jaringan bisnis penjualan langsung *direct selling* MLM, terus semakin marak dan banyak diminati orang, lantaran perdagangan dan muamalah dengan sistem MLM ini menjanjikan kekayaan yang melimpah tanpa banyak modal dan tidak begitu ribet. Jenis bisnis ini tumbuh pesat sehingga keberadaannya mengalahkan bisnis tradisional yang mengandalkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. *Multilevel marketing* keberadaannya untuk saat ini sangat menarik dikarenakan perkembangan usahanya.⁷

Dalam dasawarsa terakhir ini, dengan hubungan, jaringan internet, dan teknologi-teknologi yang semakin meluas, kita menyaksikan banyak kesempatan untuk menuai pendapatan. Sayangnya, kesempatan-kesempatan ini kadang-kadang telah menimbulkan banyak problematika di tengah kehidupan manusia luas. ~~Perniagaan elektronik~~ adalah sebuah kosa kata yang sudah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Perniagaan ini telah memudahkan urusan perniagaan kita dan mempermudah hubungan kita dengan seantara dunia. Di samping itu, fenomena ini juga banyak mewujudkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perubahan ini

⁷ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah Dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai dengan Pengelolaannya*, (Depok: Qultum Media, Cet.I, 2005),17.

adalah kelahiran *network marketing*. Kosa kata ini tentu sangat berbeda dengan *electronic marketing*.⁸

Untuk MLM sejenis ini banyak sekali yang harus dikritisi secara syariah, mengenai jenis usahanya, akad pengelola *multi level marketing*, transparansi keuntungan dan pembagiannya.

Pada dasarnya setiap kegiatan muamalah hukumnya diperbolehkan. Hal ini berdasarkan beberapa kaidah fiqih yang berbunyi:

أَلَّا صَلُّ فِي الْمَعَا مِلَةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.⁹

Maksudnya adalah setiap kegiatan muamalah itu boleh dilakukan, selama tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan ataupun yang memakruhkannya. Seperti halnya, usaha MLM tidak dapat dikatakan halal atau haram, namun semua tergantung pada praktik bisnisnya di lapangan.

Berikut ini, beberapa poin menurut fatwa DSN MUI dan menurut peraturan menteri perdagangan RI yang harus diterapkan dalam menjalankan bisnis MLM. Menurut fatwa DSN MUI poin yang harus diperhatikan yakni:

⁸ Cahyo Pramono, “*Dirrect Selling (Marketing)*” <http://www.cahyopramono.com> (06 Maret 2016)

⁹ Walid bin Rasyid Sa'idam, *Qawaid al-Buyu' qa Faraid al-Furu'* (t.t: t.p., t. th.), lihat juga mardani, *Fiqih Ekonimi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 6.

Ketentuan hukum fatwa DSN MUI:

1. Adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa.
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan suatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk suatu yang haram.
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *darar*, *zulm*, maksiat.
4. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan *excessive markup*, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama bagi mitra usaha dalam PLBS.
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan keanggotaan (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.

9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus anggota pertama dengan anggota berikutnya.
10. Sistem perekrutan keanggotaan, berikut penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak, mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain.
11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.
12. Tidak melakukan kegiatan *money game*.¹⁰

Dalam ketentuan hukum fatwa DSN MUI tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh adanya komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan kegiatan usaha pembagian komisi dengan sistem penjualan langsung oleh mitra Paytren Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ini banyak permasalahan-permasalahan yang membuat penulis ingin meninjau menurut hukum Islam. Diantaranya, adanya *upline* yang tidak atau kurang bertanggung jawab, tidak membimbing *downline* nya, hal ini akan menyebabkan terjadinya komisi pasif, dalam praktek penyelenggaraan kegiatan usaha bisnis pada mitra Paytren kecamatan Sukarame Bandar Lampung juga untuk mendapatkan komisinya hanya menitik beratkan pada penjualan

¹⁰ *Ibid*, 813-814.

langsung atau merekrut mitra baru dan tidak melakukan penjualan barang dan atau jasa.

Berdasarkan uraian dan pemaparan tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian agar menambah pemahaman kita mengenai masalah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Komisi pada Aplikasi Paytren (Studi kasus mitra Paytren Kecamatan Sukarame Bandar lampung.”

D. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktek Pembagian Komisi Pada Pengguna Aplikasi Paytren di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Sistem Pembagian Komisi Kepada Pihak Pengguna Aplikasi Paytren Pada Pengguna di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan sistem pemberian komisi pada pengguna aplikasi Paytren bagi pengguna di Kecamatan Sukarame, Bandar lampung.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem pemberian komisi kepada pihak pengguna aplikasi Paytren di Kecamatan Sukarame Bandar lampung.

2. Kegunaan Penelitian:

a. Secara teoritis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang penelitian lapangan khususnya tentang pembagian komisi yang menggunakan sistem MLM yaitu penjualan piramida, pemasaran jaringan dan pemasaran berantai dilihat dari sudut pandang Islam. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas Akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

b. Dari Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari obyek penelitian yang sebenarnya. Dalam hal ini validitas hukum yang menggejala dalam kehidupan masyarakat khususnya kaum muslim yang melakukan, mengalami atau bersinggungan langsung dalam hal jual beli pastinya membutuhkan data-data faktual dan akurat. Maka lebih dapat

dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lainnya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *field research* yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹¹ Penelitian lapangan *Field research* berlokasi di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Sebagai alasan pemilihan lokasi penelitian adalah adanya masyarakat yang melakukan bisnis dengan menggunakan aplikasi Paytren dalam menjalankan bisnisnya.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan *Library Research* sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif (pemaparan) dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, serta peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jogjakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.142

penelitian ini. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung ditempat kejadian.

Penelitian mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil analisis data berupa paparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian. Berdasarkan pengertian diatas maka penelitian deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang memaparkan dan menggambarkan peristiwa hukum dalam pembagian komisi pada masyarakat yang menjalankan bisnis dengan aplikasi Paytren di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pembagian komisi pada aplikasi Paytren yang menggunakan sistem penjualan piramida, pemasaran jaringan, dan pemasaran berantai oleh masyarakat Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹² Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang terdapat di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung sebagai tempat penelitian dan praktik pelaksanaan pembagian komisi pada aplikasi Paytren yang dilakukan di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

¹²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.30

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.¹³ Data sekunder diperoleh dari peraturan-peraturan hukum Islam (kitab-kitab), hadist, dll. Serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Menurut Nana Sudjana, populasi adalah “sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala atau objek”.¹⁵

Menurut Suharmi Arikunto Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹⁶ Jadi populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi fokus penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 48 pengguna aplikasi Paytren yang terdaftar sebagai mitra Paytren di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 58.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Alfabeta, Bandung, 2001), H.57

¹⁵ Nana Sudjana, *pedoman penyusunan Skripsi, tesis dan disertasi* (Rineka cipta, Jakarta, Edisi revisi III cet ke-4, 1998), H. 62

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 3*, (Jakarta, Bima Aksara, 1981), hlm. 202

b. Simple Random Sampling

Simple Random Sampling ialah cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) yang ada dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen (sejenis). Pengambilan sampel acak sederhana dapat dilakukan dengan cara undian, memilih bilangan dari daftar bilangan secara acak, dsb.

Dalam penelitian ini menetapkan sampel yaitu 8 orang/pengguna aplikasi Paytren bertempat tinggal di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

5. Metode Analisia Data

Data penelitian skripsi ini dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁷ Dalam menguraikan hasil penelitian, uraian tersebut menggunakan metode analisis sebagai berikut:

- a. Metode Berfikir Induktif, yaitu berangkat dari fakta yang khusus peristiwa-peristiwa yang kongkrit (nyata) ditarik generalisasi yang bersifat umum. Maksud metode ini adalah suatu cara penganalisaan terhadap data yang terkumpul dengan jalan menguraikan data tersebut kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Permasalahan yang diambil dalam metode ini adalah menjelaskan bagaimana

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004) h.127

pelaksanaan praktik pembagian komisi pada aplikasi Paytren yang dikaji dalam hukum Islam.

- b. Metode Berfikir Deduktif, yaitu menelaah suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸ Secara umum, pelaksanaan bisnis seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya sistem penjualan piramida, pemasaran jaringan, dan pemasaran berantai.



¹⁸Lexy. J Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya) h. 8

BAB II

SISTEM BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-Muslih dan Ash-Shawi, 2004).¹⁹ *Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi, yang bisa pula disebut *qiradh* yang berarti *al-qath* (potongan). Kata *mudharabah* berasal dari kata ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafaz ini termasuk lafaz *musytarak* yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat ziyadah (tambahan) sehingga menjadi مُضَارَبًا ضَارِبًا يَضْرِبُ yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.²⁰

Kata *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* pada kalimat *al-darab fi al al-ardh*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al-Jaziri, *Mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.²¹

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 60

²⁰ Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pondok Pesantren Kropyak, Yogyakarta, tt, hlm.236

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Mualamalah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 11

Ada pula yang menyebut *Qiradh* dengan muamalah yakni, akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi dua sesuai kesepakatan.²²

Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang *Hijaz* menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian *Mudharabah* dengan *qiradh* adalah dua istilah yang memiliki makna sama.²³

Mudharabah adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola *mudharib* mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola *mudharib* menyediakan keahliannya.²⁴

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{3}$ dan sebagainya. Sedangkan secara teknik *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁵

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Al-ma'arif, Bandung, 1988, hlm.36

²³ Rahmat syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.Ketiga,2002, hlm. 11

²⁴ Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook: Teori Konsep Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006, hlm.427

²⁵ Muhammad Muslaehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

Karnaen Perwatmadja mengemukakan, bahwa *Al-Mudharabah profit sharing* yaitu, penyertaan modal dalam suatu perusahaan pemerintahan atau swasta dalam bentuk pembagian laba.²⁶ Juga disebutkan dalam istilah perbankan yang dimaksud dengan pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha (keuntungan) akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditangani, dan apabila terjadi kerugian, dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan dan keluar dari akad) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian dana, sedangkan pengusaha menanggung kerugian *manajerial skill*, waktu dan nisbah keuntungan bagi hasil.²⁷

Abdullah Saeed sebagaimana dikutip oleh Sohari Sahrani mengemukakan, bahwa *mudharabah* adalah kontrak antara dua belah pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal (investor)* mempercayakan uang kepada pihak kedua, yaitu yang disebut *mudharib* untuk tujuan menjalankan usaha dagang.²⁸

Sebagaimana dikutip oleh Helmi Karim mengatakan bahwa *mudharabah* adalah “semacam syarikat akad, bermufakat dua orang dengan ketentuan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan

²⁶ Karnaen Perwatmadja dan M Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Nhakti Primayuasa, Yogyakarta, 1992, hlm. 67

²⁷ *Ibid*, hlm. 67

²⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest, A Studdi Of Riba And Its Contemporary Interpretation, Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis Paramandina*, Jakarta, hlm.77

dari pihak lain dan keuntungannya dibagi diantara mereka.²⁹ Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:³⁰

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahibul maal*.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shohibul maal*, pihak tersebut disebut *mudharib*.

Menurut istilah syara' berarti akad antara kedua belah pihak untuk kerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungannya d ibagi diantara mereka.³¹

Undang-undang lain yang menyebutkan *mudharabah* adalah UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah

²⁹ *Ibid*, hlm.188

³⁰ Helmi Karim, *Op. Cit*, hlm. 12

³¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm.

pihak atau lebih, yaitu suatu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Selanjutnya, dalam pasal 3 disebutkan bahwa SBSN dapat berupa SBSN *Mudharabah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah*.³²

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dibandingkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal sela kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.³³

Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif.

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai pengertian *mudharabah* diantaranya:

1. Menurut ulama hanafiah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad dan yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa untuk mengelola harta itu.

³² DR. Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h 63.

³³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 6

عُقْدٌ عَلَى الشَّرَكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَا لِمِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ
الْمَا خَرِ

Artinya: akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain
pemilik jasa.³⁴

2. Malikiyah berpendapat, bahwa *mudharabah* adalah:

عُقْدٌ تَوْكِيلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَجَرَّ بِخُصُوصِ
النَّقْدَيْنِ (الْكَافِ وَالْفِضَّةِ)

Artinya: Dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya
kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran
yang ditentukan (emas dan perak).³⁵

3. Imam hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عِبَارَةُ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَجَرَّرُ
فِيهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ

Artinya: Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran
tertentu kepada orang berdagang dengan bagian dari
keuntungan yang diketahui.³⁶

4. Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah:

عُقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخَرٍ مَا لَا لِيَتَجَرَّرَ فِيهِ

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh al-Madzhab Al-Ar Baah, Juz II*, Tiariyah Qubra, Mesir, hlm.35

³⁵ *Ibid*, hlm. 38

³⁶ *Ibid*, hlm. 42

Artinya: Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *mudharabah* di *itjarahkan*.³⁷

5. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan diperjanjikan.³⁸

6. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى نَقْدٍ لِيَتَصَرَّرَ فِيهِ الْعَامِلُ بِالتَّجَارَةِ

Artinya: Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.³⁹

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁴⁰

Jual beli yang dilakukan dalam bagi hasil ini merupakan jual beli jasa. Pemberian izin dari pemilik jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan jasa yang dilisensikan. Jadi lisensi Paytren merupakan pemberian izin pemasaran produk aplikasi, sekali seumur hidup dan dapat diwariskan. Kemudian semua yang dilakukan dalam aplikasi Paytren ini menggunakan sistem online, jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang dijual tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. jual beli jasa yang dilakukan di aplikasi Paytren berupa voucher pulsa

³⁷ *Ibid*, hlm. 44

³⁸ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, jilid 13, alih bahasa, kamaludin A.marzuki, al-ma-arif, semarang, 1997, hlm.36

³⁹ Moh Rifa'I, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 218

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.136

baik reguler maupun data, voucher game, token PLN, tagihan TV prabayar, tagihan PDAM dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian *mudharabah* diatas dapat dipahami mudharabah itu sendiri adalah suatu akad antara pemodal *shahibul maal* dengan pengusaha *mudharib* untuk membentuk suatu kemitraan *join partnership* dan menyediakan dana dan pihak yang memiliki pengalaman, keahlian *enterprenure* menyalurkan dana tersebut sehingga menciptakan nilai tambah dan diantara kedua pihak dalam kemitraan ini akan berbagi keuntungan.⁴¹

Bentuk usaha *mudharabah* ini, ada pada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya. Kebijakan Allah menuntut dibolehkannya kongsi *mudharabah* ini, karena orang-orang yang membutuhkan. Selain itu karena uang tidak akan berkembang kecuali diinvestasikan dan diniagakan, Al-Alamah Ibnul Qayyim berkata, *mudharib* (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal.⁴² *Mudharib* sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya, ia sebagai wakil ketika *mudharib* ini mengembangkan harta tersebut, dan sebagai orang yang diubah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta, dan *mudharib* sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut.

⁴¹O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2000, hlm. 41

⁴² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta, 2006 hlm. 468

Dalam kontrak *mudharabah*, kepemilikan proyek adalah milik bersama antara pemodal *shohibul mall* pelaksana *mudharib*. Namun hak kepemilikannya secara terperinci adalah modal *mudharabah* tetap menjadi hak milik *shahibul mal*, adapun keuntungan yang dihasilkan oleh usaha *syarikat mudharabah* tadi jadi milik bersama dan pembagian hak kepemilikannya menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Jadi, *mudharib* tidak berhak mengambil bagiannya dari keuntungan tanpa sepengetahuan atau kehadiran *shahibul mal* dan sebaliknya juga demikian. Keuntungan tersebut jadi milik bersama antara *shahibul mal* dan *mudharib* karena modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing (Asy-Syarbini; Al-Bahuti; Ad-Dasuqi; dan Al-Kasani, dalam Muhammad, 2003: 90).⁴³

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi itu bukan akibat kelalaian si pengelola, jika akibat kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁴ Keuntungan bersih dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal intesor *shahibul al-mal* dikembalikan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk

⁴³ Dr. Muhammad, M, Ag, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 68

⁴⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Fajar Media Perss, 2010, hlm. 184

mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.⁴⁵

B. Dasar Hukum Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Shuhaib r.a, bahwasanya Rasulullah Saw. Telah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan delai untuk keluarga, bukan untuk dijual.⁴⁶

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku.”

Dalam al-Muwaththa’ Imam Malik, dari al-A’la Ibn Abd al-Rahman Ibn Yaa’qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Utsman r.a. sedangkan keuntungannya dibagi dua.⁴⁷

⁴⁵ Rachmad Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, 2010, hlm. 223

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm.138

⁴⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh islam*, hlm.196

Qiradh atau Mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a. yang kemudian menjadi istri beliau.

Islam mensyari'atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerjasama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kesulitan.

Ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* diisyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Ijma, dan Qiyas.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain:

Firman Allah SWT dalam Surah An-nisa Ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٦٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.⁴⁸

Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah Ayat 1:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dapat kita ketahui bahwa untuk mencari karunia Allah dapat dilakukan secara *mudharabah* dan hukumnya boleh dan sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak merugikan salah satu pihak, dalam arti salah seorang diantara yang berakad tidak berbuat curang untuk mendapatkan nisbah yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010, hlm. 83

b. As-Sunnah

Beberapa hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* dasar hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib adalah boleh (mubah). Bahwa nabi SAW bersabda:

عَنْ صُهِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْنَّيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَبَيْتٍ لِّمَا لِلْبَيْعِ " رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةَ بِأَسَنَادٍ ضَعِيفٍ "

Artinya : Dari Shuhaib r.a bahwasanya Nabi Saw. Bersabda, "tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, meminjamkan modal untuk didagangkan dan mencampur gandum dengan jagung centel untuk memakan dirumah tidak dijual." (HR. Ibnu Majah dengan Isnad lemah.)⁴⁹

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Ibn Abbas disebutkan:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كُنَ يَشْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَا لَا مُقَارَضَةَ : أَنْ لَمَّا تَجَعَلَ مَا لِي فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ. وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرِ، وَلَمَّا تَنَزَلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْءًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَا لِي. رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيٌّ، وَرَجَّاهُ ثِقَاتٌ ، وَقَالَ مَا لَكَ فِي الْمَوْطَأِ. عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَا لِي لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ بَحَ بَيْنَهُمَا .

وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

Artinya: Dari Hakim bin Hizam r.a bahwasanya disyaratkan kepada seseorang jika ia memberi modal sebagai qiradh, yaitu: janganlah modalku itu dipergunakan unruk barang yang bernyawa, janganlah dibawa ke laut, dan janganlah dibawa ke jurang tempat air yang

⁴⁹Buluqul Maram, Penerbit Darul Akhyar, Beirut, 773 H – 852 H, hlm. 157

mengalir deras. Jika kamu melakukan sesuatu dari syarat-syarat itu, maka engkaulah yang menanggung modalnya. (HR. Daraquthni) para perawiya dapat dipercaya). Imam malik berkata di dalam kitab Al-Muwaththa' dari Al-'Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya bahwasanya ia pernah berdagang dengan modal milik Utsman dengan syarat untung dibagi dua. (hadis muqaf sahih).⁵⁰

c. Ijma

Sebagai contoh Ijma dalam *mudharabah*, yakni adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat seperti Umar dan Siti Aisyah dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu ini dapat disebut Ijma.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada Al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas yakni, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁵¹ Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁵²

⁵⁰ Buluqul Maram, *Op. Cit*, hlm. 157

⁵¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 191

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 370

C. Bentuk-Bentuk Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Pada prinsipnya *Mudharabah* sifatnya mutlak yaitu *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Hal ini karena ciri khas *mudharabah* jaman dahulu adalah berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan atau amanah yang tinggi. Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, terdapat dua kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana dalam mengaplikasikan akad *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah* (Unrestricted Investmen Account atau URIA) dan *mudharabah muqayyadah* (Restricted Investment Account atau RIA).⁵³

Berikut adalah bentuk-bentuk bagi hasil (*Mudharabah*)

1. *Mudharabah Muthlaqoh* (Unrestricted Investmen Account atau URIA)

Mudharabah muthlaqoh adalah bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, perusahaan, dan pelanggan. Dalam akad *mudharabah mutlaqah* pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha, termasuk lokasi dan tujuan usaha, pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.⁵⁴ Dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis

⁵³ Adiwarman A. Karim, *op.cit.*, hlm.352.

⁵⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2016, hlm.157.

produk penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan *deposito mudharabah*.

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk *deposito mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (bilyet) deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

- e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁵⁵

2. *Mudharabah Muqayyadah* (Restricted Investment Account atau RIA)

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*, *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Jenis *mudharabah muqayyadah* ini dibagi menjadi 2 yaitu⁵⁶:

a. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana *shahibul maal* membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus *restricted investment* dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2004, Cet 2, hlm. 99-100.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 314

- a. Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- d. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan *bilyed* deposito kepada deposan.⁵⁷

D. Macam-macam akad/ produk bisnis yang menggunakan bagi hasil

1. Perdagangan (tijarah)

a. Dasar Hukum

Perdagangan adalah usaha produktif utama yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat r.hum. kebanyakan para sahabat dari golongan muhajirin berprofesi sebagai seorang da'i dan juga merupakan seorang pedagang seperti Abu Bakar, Umar, Usman, dan sebagainya. Sementara itu sahabat dari golongan anshor rata-rata berprofesi sebagai petani (petani kurma).

⁵⁷*Ibid*, hlm. 100-101

Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan Hadits yang menjelaskan kebolehan perdagangan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

b. Pentingnya perdagangan

Pentingnya perdagangan sangat banyak, terutama berkaitan dengan mata pencaharian yang paling utama di dalam Islam. Demikian juga hikmah perdagangan akan membangun sistem perekonomian yang kuat dan mantap. Imam said bin Mansur meriwayatkan bahwa Naim bin Abdurrahman dan Yahya bun Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sembilan dari

sepuluh rezeki diperoleh dari perdagangan dan sepersepuluh diperoleh dari perternakan”.

Diriwayatkan oleh imam Malik dari Umar r.a. berkata: *“Aku nasihatkan kepadamu untuk berdagang sehingga orang-orang-orang merah ini (bukan arab) tidak menjadi halangan bagimu dalam urusan keduniaan.”* Dalam mengomentari riwayat ini, imam Ashab Malika (dalam Zakiriyya Al-Kandahlawi, 2004) berkata, *“orang-orang quraisy sangat gemar berdagang, sedangkan orang-orang arab lainnya menganggap berdagang sebagai pekerjaan rendah”*. Istilah orang-orang merah artinya para hamba sahaya non-Arab yang biasanya memiliki kulit kemerah-merahan. Ibnu Amirul Hajj juga meriwayatkan hadits di atas bahwa suatu ketika Umar r.a. mengunjungi pasar. Disana ia mengamati hampir semua pedagang adalah orang asing dan berasal dari kalangan bawah. Keadaan ini menjadikan beliau merasa perihatin sehingga mengeluarkan kata-kata seperti di atas. Kemudian ada beberapa orang bertanya, tetapi tuan, Allah telah menaklukan beberapa daratan untuk kita, sehingga dari tanah taklukan itu berdatangan harta kekayaan, oleh karena itu kita tidak perlu berdagang untuk memenuhi kebutuhan kita. *“Umar r.a menjawab apabila engkau meninggalkan berdagang sebagai pekerjaanmu, engkau akan mendapatkan kaum laki-laki akan*

bergantung kepada laki-laki lainnya, dan kaum wanita akan bergantung dengan wanita lainnya”.

c. Etika perdagangan

Demikian kepentingan perdagangan, sehingga perlu etika dalam pelaksanaannya. Para ulama sepakat bahwa siapa pun yang bermaksud mengadakan jual-beli atau perdagangan hendaknya mengetahui hukum-hukum dan etika dalam perdagangan. Disini akan dibahas etika pergangan, sedangkan hukum dan macam transaksinya akan dibahas tersendiri dalam bab transaksi dalam Islam. Dalam berbagai riwayat terdapat etika atau sifat seorang pedagang. Dalam riwayat At Asbahani dan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan pedagang yang mempunyai sifat-sifat mulia, yaitu: “sesungguhnya mata pencaharian terbaik adalah berdagang yang apabila berbicara tidak berdusta, apabila diberi amanat tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila membeli mereka tidak mencela barang dibelinya, apabila menjual tidak memuji barang yang dijualnya. Jika mereka disuruh untuk membayar hutang, mereka tidak berdalih dan apabila yang membayar hutang lambat pembayarannya, mereka tidak menyempitkan orang yang berhutang.” (HR. Al Asbahani dan Al Baihaqi dari Muadz bin Jabbal).

Demikian juga dalam hadits yang diriwayatkan al Asbahani dari Abu Umamah r.a., Rasulullah SAW bersabda : “sesungguhnya

seorang pedagang apabila memiliki empat sifat pedagang, maka rezekinya akan lancar: Apabila ia memberi barang ia tidak mencela, apabila menjual ia tidak menipu dan apabila menjual atau memberi ia tidak bersumpah.”

2. Pertanian dan Perkebunan

a. Dasar Hukum

Dasar hukum seorang muslim dapat memilih jenis produksi pada bidang pertanian atau perkebunan banyak terdapat baik pada Al-Quran maupun Al Hadits. Allah SWT berfirman dalam surah Hud ayat 61:

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۝﴾

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Menurut Imam Abu Bakar Al Jashash Razi (dalam Al Kandahlawi, 2004), dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mengisi bumi dengan tanaman, perkebunan dan buah-buahan, bahkan bangunan adalah wajib.

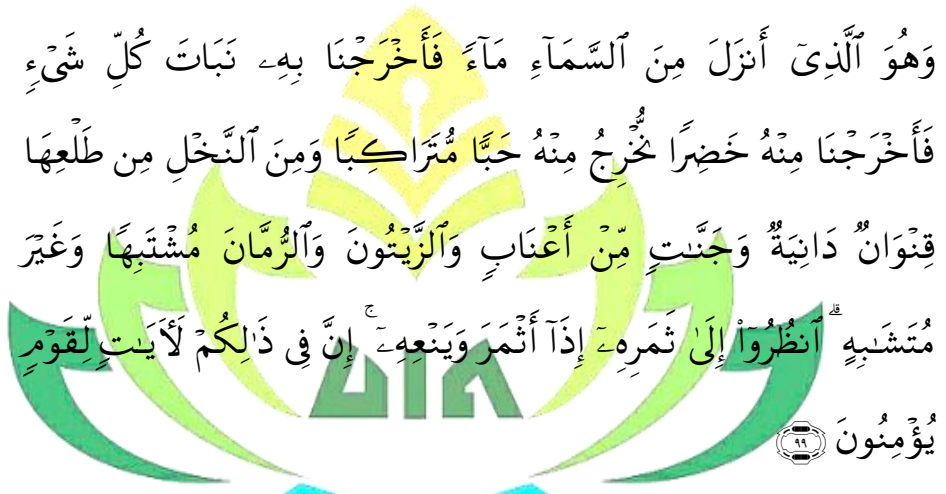
Dasar hukum dari Al-Hadits , Rasulullah SAW bersabda: “*tiada seorang muslim pun yang menanam satu pohon atau berkebun,*

kemudian seseorang atau seekor burung atau binatang lainnya memakannya, maka semua itu dianggap sebagai sedekah baginya”.

Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, “Dan apabila apa saja dari yang ditanamnya itu dicuri, ia juga akan dianggap sebagai sedekah.”(HR. Muslim dari Anas).

b. Kepentingan Pertanian

Keutamaan pertanian banyak disebutkan dalam Al Quran dan Al Hadits Nabi. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan kepentingan usaha pertanian, yaitu dalam surah Al An'am ayat 99:



وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنْظِرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya: *Dan Dialah (Allah) yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu, segala macam tumbuhan, maka kami keluarkan dari tanaman yang menhijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.*

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan tentang air dan tanaman serta proses pengembangbiakannya. Semua ini menunjukkan betapa besarnya

karunia Allah yang diberikan kepada manusia sebagai pengelola bumi. Didalam hadits yang membicarakan tentang sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus diterima, bahkan setelah penyedekahnya meninggal dunia), kita juga akan menemukan kata-kata dari hadits di atas yaitu: “*aw gharasa gharsan*” yang artinya : atau menanam tanam (pohon)”. Dengan demikian, orang yang menanam pohon sehingga dapat dipetik manfaat dari pohon itu, orang-orang tersebut akan menerima pahala meskipun pahala ia telah meninggal dunia.

3. Industri

Dasar Hukum

Dalam al-Quran, Allah SWT menciptakan unsur-unsur tertentu untuk digunakan oleh manusia dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (produk). Hal ini menjadikan dasar hukum perindustrian. Sebagaimana dalam surat Al Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka menggunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya Kuat lagi Maha Perkasa”.

Bekerja mengolah sesuatu (bahan mentah) menjadi suatu barang yang bermanfaat bagi manusia atau dengan istilah lain “industri” merupakan usaha (produksi) yang diperoleh dalam Islam. Para nabi berindustri dalam memperoleh sebagian asbab rezekinya.

Dari hadits ini, nabi Daud a.s. menjadi tukang besi sebagai profesi sampingannya di samping yang utama seorang nabi atau da'i yang menyeru kepada kebaikan. Demikian juga menurut hadits dari Abu Hurairah r.a bahwa nabi Zakaria a.s. adalah seorang tukang kayu. Sedangkan Ibnu Umar menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan tangannya sendiri (profesionalitas)”* (HR. Thabrani). Imam Ghazali berpendapat bahwa kerajinan (industri) merupakan bagian dari fardhu kifayah sebagaimana pertanian, tenun, dan politik, bahkan pembekaman dan jahit. Jika satu negara tidak terdapat orang yang berprofesi sebagai pembekam misalnya, maka kerusakan akan segera menghampiri penduduknya dan mereka berdosa karena kondisi ini akan mendorong terjadinya kerusakan. Jika Allah menurunkan penyakit, maka Allah juga akan menurunkan akan menurunkan obatnya dan menunjukkan cara memakainya.⁵⁸

⁵⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75-

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN

Sejarah Singkat Kelurahan Sukarame

Istilah Sukarame diperkenalkan sejak Zaman Penjajahan Belanda, karena pada zaman dahulu secara rutin setiap hari minggu para buruh atau pekerja perkebunan menerima gaji/upah dan selalu ramai dengan berbagai jenis hiburan rakyat atau tontonan. Oleh sebab itu, sejak saat itu wilayah tersebut diberi julukan Sukarame.

Pada zaman penjajahan Belanda, Kelurahan Sukarame merupakan bagian dari Kelurahan Sukabumi yang sebagian besar arealnya/tanahnya termasuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan karet asing (Belanda). Ketika Jepang ke Indonesia, perkebunan karet tersebut di bumi hanguskan oleh Jepang untuk dipergunakan tanaman padi rakyat, yang kemudian oleh penggarap areal tanah tersebut dijadikan tempat pemukiman dan perladangan hingga sekarang.

Seiring perkembangan akhirnya sebutan Sukarame mulai dipergunakan sejak masa pemerintahan Belanda. Sekitar tahun 1933 Sukarame masih sebagai wilayah administratif dari Kelurahan Sukabumi yang telah berdiri terlebih dahulu. Pada saat itu Sukarame dikepalai oleh Kepala Kampung pertama yaitu Saudara Muhammad Nawi. Kemudian setelah kepemimpinan Sdr. Muhammad Nawi terjadi penggantian jabatan Kepala Kampung melalui musyawarah warga dan diadakan pemilihan yang pertama. Pemilihan tersebut

dimenangkan oleh Saudara Kromotikno, yang menandakan pergantian jabatan yang pertama. Namun semenjak kepemimpinan Kepala Kampung Kromotikno justru Sukarame menjadi pusat pemerintahan dengan nama Kampung Sukarame dan Sukabumi menjadi wilayah administratif.

Seiring waktu, pasca kemerdekaan Republik Indonesia akhirnya pemerintah memecah kedua wilayah tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Residen Lampung Nomor : 35/0/tanggal 19 Maret 1959 Kampung Sukabumi dan Sukarame berdiri sendiri dengan Kepala Pemerintahan masing-masing di Kepalai oleh Hasanuddin sebagai Kepala Kampung Sukabumi dan M. Djamsari sebagai Kepala Kampung Sukarame.

Setelah wilayah tersebut berdiri sendiri, ternyata masa kritis politik di Indonesia mempengaruhi kehidupan politik di Kampung Sukarame secara langsung. Ditandai saat menjelang meletusnya G.30.S. PKI, peta wilayah Kampung Sukarame pun dipecah menjadi dua Kampung Susukan, yaitu Kampung Susukan Way Dadi dan Kampung Susukan Way Hui yang masing-masing Susukan dikepalai oleh Kepala Susukan. Kemudian sesudah meletusnya G.30.S. PKI tahun 1965 Kepala Susukan Way Dadi ternyata terlibat dalam G.30.S. PKI, dan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Selatan Kampung Susukan Way Dadi dibubarkan dan digabungkan kembali dengan Kampung Sukarame, sedangkan Kampung Way Hui tetap berdiri sendiri.

Sejarah Kepemimpinan Kelurahan Sukarame

Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, Kelurahan Sukarame menjadi Kelurahan Sukarame I yang merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Sukarame pada waktu itu. Reformasi dalam tubuh Kelurahan Sukarame pun dibuat guna menentukan batasan yang nyata dari wilayah dan atas kepemimpinan pemerintahan di wilayah tersebut, yang pada saat itu Kepala Desa sudah mulai berubah sebutannya menjadi Kepala Kelurahan. Kemudian secara kronologis peta jabatan Kepala Kelurahan Sukarame I dari awal adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Sukarame yang ke I (satu) adalah Bapak Muhammad Nawi (Tahun 1930).
2. Kepala Desa Sukarame yang ke II (dua) adalah Bapak Kromotikno (Tahun 1930-1940).
3. Kepala Desa Sukarame yang ke III (tiga) adalah Bapak Sakir (Tahun 1940-1948).
4. Kepala Desa Sukarame yang ke IV (empat) adalah Bapak M. Djamsari (Tahun 1948-1980).
5. Kepala Desa Sukarame yang ke V (lima) adalah Bapak M. Sanusi (Tahun 1980-1984).
6. Kepala Desa Sukarame yang ke VI (enam) adalah Ny. Entjun Sunariah (Tahun 1985-1989).

7. Kepala Kelurahan Sukarame yang ke VII (tujuh) adalah Bapak Salehuddin (Tahun 1989-1994).
8. Kepala Kelurahan Sukarame yang ke VIII (delapan) adalah Drs. Yahya (Tahun 1994-1998).
9. Kepala Kelurahan Sukarame yang ke IX (Sembilan) adalah Bapak M. Husein (Tahun 1998-2002).
10. Kepala Kelurahan Sukarame yang ke X (Sepuluh) adalah Darsani Jasri, S.Pd (Tahun 2002-2005).
11. Kepala Kelurahan Sukarame yang ke XI (sebelas) adalah Paksi Sabirin, S.Ip (Tahun 2005-2007).
12. Kepala Kelurahan Sukarame yang ke XII (dua belas) adalah Drs. Suherman (Tanggal 14 Februari 2007-15 Juli 2007).
13. Kepala Kelurahan Sukarame yang ke XIII (tiga belas) adalah Drs. Junaidi (Tanggal 15 Juli 2007-18 Maret 2008).
14. Kepala Kelurahan Sukarame yang ke XIV (empat belas) adalah Drs. Hazairin (Tanggal 18 Maret 2008-22 Maret 2009).
15. Kepala Kelurahan Sukarame yang ke XV (lima belas) adalah Parbe Mujiono (Tanggal 22 Maret 2009-Sekarang).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan diatas, yang menetapkan batasan pada Kelurahan Sukarame, hingga kini wilayah tersebut telah memiliki wilayah administratif yang jelas. Sehingga kepala pemerintahan di wilayah kelurahan tersebut tidak perlu mencari solusi atas

konflik mengenai batasan wilayah/peta administratif atas wilayah kelurahan yang lain.

Berikut adalah batasan wilayah Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung:

1. Sebelah Utara : berbatasan langsung dengan Kelurahan Harapan Jaya.
2. Sebelah Selatan : berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukabumi.
3. Sebelah Timur : berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Barat : berbatasan langsung dengan Kelurahan Gunung Sulah.

(Sumber: Arsip Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)

Gambaran Wilayah Kelurahan Sukarame

Luas wilayah Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan peta administratif kelurahan tersebut adalah 493 Ha (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Hektar), namun luas tersebut tidak hanya digunakan oleh penduduk sebagai pemukiman, tetapi wilayah Kelurahan Sukarame juga memiliki potensi Sumber Daya Alam. Hal ini dapat dilihat pada data bagian lahan berdasarkan penggunaannya, yaitu :

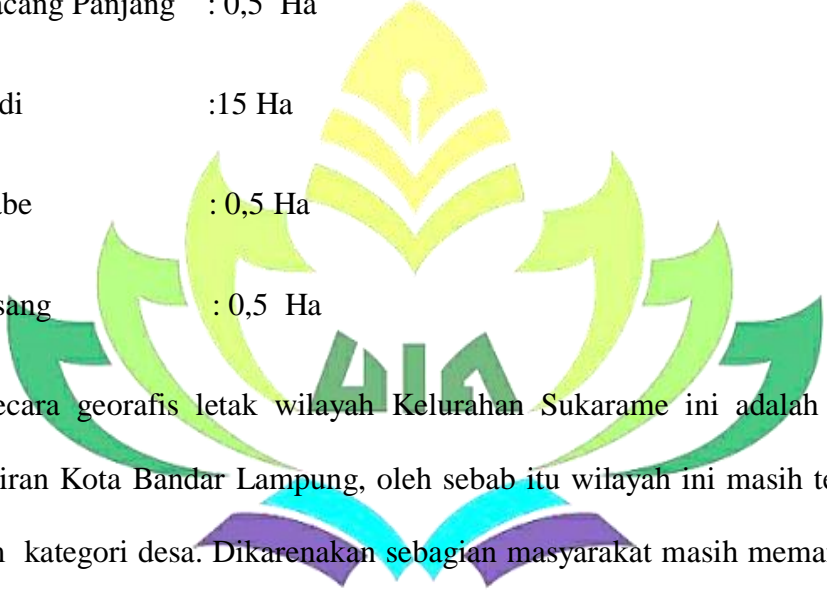
1. Ladang : 30 Ha
2. Pemukiman : 458,4 Ha

Berdasarkan data di atas, terdapat sebanyak 30 Ha luas Kelurahan Sukarame digunakan sebagai lahan perladangan. Minimnya lahan yang

dipergunakan warga sebagai lahan perladangan tersebut, karena sebagian besar warga yang berdomisili di Wilayah Kelurahan Sukarame merupakan pegawai pemerintahan serta pekerja sektor swasta. Namun pada umumnya luas lahan perladangan tersebut, sebagian besar dipergunakan masyarakat sebagai lahan pertanian dengan komoditas alam seperti padi, sayur mayur, serta buah-buahan.

Berikut adalah data penggunaan luas lahan sebagai pertanian berdasarkan komoditas alam di Wilayah Kelurahan Sukarame :

1. Kacang Panjang : 0,5 Ha
2. Padi : 15 Ha
3. Cabe : 0,5 Ha
4. Pisang : 0,5 Ha



Secara geografis letak wilayah Kelurahan Sukarame ini adalah wilayah pinggiran Kota Bandar Lampung, oleh sebab itu wilayah ini masih tergolong dalam kategori desa. Dikarenakan sebagian masyarakat masih memanfaatkan lahan disekitar sebagai lahan pertanian, dengan potensi komoditas padi 15 Ha (Lima Belas Hektar). Namun meskipun wilayah ini tergolong kategori desa, tetapi sebenarnya jarak antara Kelurahan Sukarame dengan Pusat Kota hanya berjarak 2 Km (Dua Kilometer) dengan jarak tempuh waktu secara normal adalah lima belas menit perjalanan. Oleh karena itu, mobilitas di wilayah ini sangat tinggi khususnya mobilitas masyarakat ke pusat kota. Berikut peta

jarak atau orbitasi dari Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung:



Gambar 2. Peta Orbitasi Kelurahan Sukarame

Populasi Penduduk Wilayah Kelurahan Sukarame

Populasi penduduk yang mencapai 18.189 jiwa membuat wilayah ini termasuk ke dalam wilayah yang padat penduduk, sebab perbandingan jumlah penduduk yang berjumlah 18.189 orang dengan luas wilayah 493 Ha menempatkan wilayah ini sebagai wilayah yang padat penduduk cukup tinggi. Apabila dilihat berdasarkan golongan umur, angka di setiap golongan umur tidak ada yang berjumlah dibawah 1000 jiwa. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur Dan Jenis Kelamin Di Kelurahan Sukarame Tahun 2010

No.	Golongan Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	1.934	1.168	3.102
2	5-6	700	852	1.552
3	7-13	666	914	1.580
4	14-16	423	919	1.342
5	17-24	1.405	1.796	3.201
6	25-54	1.932	2.141	4.073
7	>55	1.602	1.737	3.339
	Jumlah	8.662	9.527	18.189

Sumber: Arsip Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

Tingginya angka golongan umur nol sampai empat tahun menggambarkan bahwa angka kelahiran di wilayah ini cukup tinggi, hal ini dapat menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan penduduk di Wilayah Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung secara signifikan. Sedangkan penduduk pada golongan usia muda yaitu 17-24 tahun, jumlahnya dapat bertambah setiap periode enam bulan sekali. Hal ini dikarenakan di Wilayah Kelurahan Sukarame terdapat beberapa rumah kontrakan, mayoritas penghuninya adalah mahasiswa/i yang menetap sementara untuk kuliah.

Tingkat Pendidikan di Wilayah Kelurahan Sukarame

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang penting pula dalam menggambarkan dan mengukur kepatuhan hukum masyarakat. Maka dalam hal ini akan dilihat bagaimana tingkat pendidikan di wilayah Kelurahan Sukarame. Dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana	621	572	1.193
2	Sarjana Muda	186	221	407
3	SLTA	1.898	1.548	3.446
4	SLTP	1.226	1.307	2.533
5	SD	3.169	3.908	7.077
6	Taman Kanak-Kanak	398	446	844
7	Belum Sekolah	1.164	1.525	2.689
8	Buta Huruf	0	0	0
	Jumlah	8.662	9.527	18.189

Sumber: Arsip Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

Mayoritas tingkat pendidikan di wilayah ini adalah SD dikarenakan sebagian besar penduduk di wilayah ini masih mengandalkan kehidupan tradisional seperti bertani. Hal ini yang mendorong pola pikir mereka tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Namun, jumlah tingkat pendidikan 1.193, yaitu tingkat pendidikan sarjana 6,5% (Enam koma lima persen) memberikan sumbangan yang cukup besar untuk wilayah Kelurahan Sukarame. Artinya tingkat pendidikan di wilayah Kelurahan Sukarame tergolong tingkat pendidikan tinggi, dan didukung pula oleh angka buta huruf sebesar 0%.

B. PENGERTIAN PAYTREN DAN SEJARAH PAYTREN

Paytren adalah sebuah software atau aplikasi yang bisa di operasikan di handphone android dan juga ios. Paytren adalah produk keluaran PT.Veritra Sentosa Internasional (VSI), PT.VSI sendiri adalah milik dari ustadz Yusuf Mansur, beliau melalui Paytren bermaksud ingin membantu masyarakat Indonesia khususnya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk

memperoleh penghasilan yang biasanya hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, dengan Paytren beliau berharap bisa meratakan perekonomian masyarakat Indonesia.⁵⁹

Paytren berfungsi sebagai aplikasi yang akan mengubah handphone anda menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan, bisa digunakan untuk melakukan berbagai transaksi seperti beli pulsa, bayar/token listrik, bayar PDAM, setor berbagai macam kredit, beli tiket pesawat/kereta dan masih banyak transaksi lain yang bisa anda lakukan di aplikasi Paytren ini. Paytren juga memiliki menu inspirasi UMY yang berisi banyak ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, dari menu Paytren messenger media social karya anak bangsa (hanya bisa digunakan oleh mitra Paytren saja).

Keuntungan menggunakan Paytren tidak hanya dari fungsinya saja, akan tetapi Paytren memiliki kebijakan yang bisa menguntungkan bagi yang menggunakan Paytren, yaitu komisi dan bonus di setiap transaksi apa saja yang anda lakukan, tidak banyak memang banyak memang hanya Rp.75,- pertransaksi yang anda lakukan, tapi anda harus catat harga pulsa, listrik dll sedikit lebih murah dari penjual jasa transaksi lainnya, dan jika dibandingkan dengan anda harus pergi ke loket pembayaran apalagi harus mengantri menyita banyak waktu juga tenaga jika menggunakan Paytren anda hanya tinggal klik-klik saja dan akan mendapat cashback dan juga bonus.⁶⁰

⁵⁹ www.berkahpaytrenku.com/2017/01/1.html?m=1

⁶⁰ <http://www.kangrokim.com/2015/08/banyak-di-paytren-murah-dan-dapat-html?m=1>

SEJARAH PAYTREN

Perusahaan didirikan pada tanggal 10 juli 2013 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.47 oleh Notaris/ PPAT H.wira Francisca, SH., MH. Perusahaan ini didirikan langsung oleh pemilik perusahaan yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Treni adalah akronim perusahaan PT. Veritra Sentosa Internasional yang resmi menggantikan VSI sejak juni 2014. Perubahan juga terjadi pada nama produk sebelumnya (V-Pay) berganti menjadi Paytren yaitu teknologi layanan transaksi yang dapat digunakan pada semua jenis telepon selular atau handphone (melalui Aplikasi Android, Yahoo Messenger, Gtalk/Hangouts, atau SMS biasa) untuk memudahkan melakukan pembayaran seperti halnya pembayaran melalui ATM/Internet Banking/PPOB yang berlaku di lingkungan komunitas tertutup/intern. Komunitas ini disebut sebagai komunitas TRENI atau dikenal pula sebagai Komunitas Paytren yaitu sekelompok masyarakat yang terdaftar sebagai mitra pengguna atau pebisnis teknologi Paytren yang menggunakan sistem MLM.

Pemasaran adalah salah satu kegiatan yang penting dari sebuah perusahaan. Pemasaran dapat dipandang sebagai tugas untuk memperkenalkan, menciptakan, dan menyerahkan produk-produk kepada konsumen. Pemasaran juga disebut *the art of selling products* (seni menjual produk). Karena pemasaran memiliki peran penting dalam kesinambungan sebuah perusahaan, maka pemasar perlu mengembangkan *intends to do* (strategi). Salah satu strategi tersebut adalah Multi Level Marketing (MLM). Pemasaran merupakan salah satu bentuk

muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah.⁶¹

Keberadaan bisnis MLM atau Multi Level Marketing dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini terlihat dari semakin banyak perusahaan yang berdiri menggunakan sistem MLM, antara lain Tupperware, Thiansi serta MLM yang berlabel syariah. Salah satu perusahaan MLM yang telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia adalah PT. Ahad-Net Internasional.

Beranjak dari potensi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi canggih, lahirlah gagasan dari Yusuf Mansur yang ingin menjembatani kemudahan pembayaran semua kebutuhan masyarakat dengan menggabungkan kebiasaan menggunakan *gadget* dan kebiasaan membayar kewajiban. Sejalan dengan itu pada tanggal 10 juli tahun 2013 lahirlah Veritra Sentosa Internasional atau Treni dengan paytren sebagai produknya. PT.Veritra Sentosa Internasional adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan produk dimana sistem atau cara pemasarannya dilakukan melalui kegiatan penjualan langsung lewat jaringan pemasaran yang dikembangkan dalam bentuk mitra usaha *Direct Selling* dengan sistem *binary*.

PT. VSI beralamatkan di Wisma Ritra Lantai 1 (satu) jalan Soekarno Hatta No. 54275.PT. VSI ini menyadari pentingnya memelihara reputasi yang baik serta dibutuhkan tanggung jawab dan profesionalisme tinggi dari setiap pelaku bisnis yang terlibat, berdasarkan pada kepercayaan dan kejujuran.

⁶¹ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006, h. 25.

Beberapa prinsip usaha yang diterapkan di perusahaan adalah tindakan yang bertanggung jawab penuh dengan integritas yang baik, berdasarkan norma Islam, patuh dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta menghormati budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Mitra perusahaan sebagai salah satu pelaku bisnis yang berpengaruh terhadap reputasi perusahaan PT. VSI dilengkapi dengan suatu Kode Etik dan perilaku untuk menghindari benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan informasi.

Perilaku mitra ini diatur dalam Kode Etik, bertujuan agar setiap Mitra selalu bertindak dengan etis, konsisten dan penuh integritas sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, kepatuhan mitra terhadap syariah Islam, hukum dan peraturan yang berlaku serta rasa hormat terhadap tradisi dan budaya Indonesia mencerminkan bahwa praktek penjualan akurat, berimbang, lengkap dan memenuhi etika standar. Dengan demikian, peraturan dan Kode Etik Mitra PT. Veritra Sentosa Internasional ini wajib dipatuhi oleh setiap mitra dalam menjalankan profesinya.⁶²

Visi Misi PT. Veritra Sentosa Internasional

Dalam hal pencapaian suatu tujuan, sebuah perusahaan perlu adanya suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai

⁶² Peraturan dan Kode Etik Mitra PT. Veritra Sentosa Internasional, tth.

dengan tindakan sesuai dengan perencanaan pencapaian. PT. Veritra Sentosa Internasional juga mempunyai visi dan misi sebagai berikut:⁶³

a. Visi

Menjadi perusahaan penyedia layanan teknologi perantara transaksi terbaik di tingkat nasional melalui pembentukan komunitas dengan konsep jejaring.

b. Misi

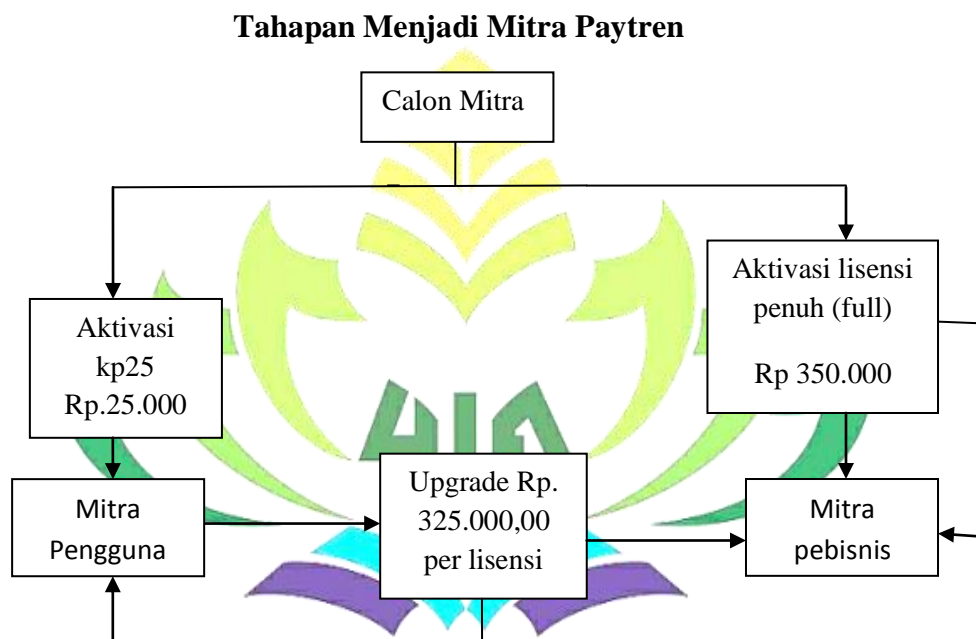
1. Mewujudkan sistem layanan bagi seluruh pengguna/ pemilik handphone untuk turut serta membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada sector berbasis biaya transaksi (fee-based income).
2. Mendorong masyarakat pengguna/pemilik handphone untuk meningkatkan fungsi handphone dari hanya sekedar alat berkomunikasi biasa menjadi alat untuk bertransaksi dengan manfaat/keuntungan (benefit) yang tidak akan didapatkan dari cara bertransaksi yang biasa.
3. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan sumber daya manusia (SDM) PT. Veritra Sentosa Internasional (TRENI) yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategi berbasis kinerja serta tata kelola yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan.
4. Membentuk 10 juta komunitas dengan konsep jejaring yang berlaku baik secara regional maupun internasional.

⁶³ Starter kit PT. Veritra Sentosa Internasioanl, diperoleh 17 November 2014.

C. SISTEM OPERASIONAL PAYTREN DAN BAGI HASIL PAYTREN

Sistem MLM pada PT. Veritra Sentosa Internasional menganut sistem *Binary Plan*. *Binary Plan* adalah sistem MLM yang memprioritaskan jaringan hanya dua *leg* saja yaitu *leg* kiri dan *leg* kanan. Dengan semakin seimbang jaringan, maka semakin tinggi pula *income* yang didapat.

PT. Veritra Sentosa Internasioal mewajibkan calon mitra untuk mendaftarkan diri sebagai mitra Paytren dengan beberapa tahapan sebagai berikut:



Sumber: ilustrasi gambar diperoleh dari website [www. Paytren.co.id](http://www.Paytren.co.id).

Mekanisme Anggota

Dalam prakteknya PT. Veritra Sentosa Internasional menawarkan dua sistem kemitraan yaitu mitra pengguna dan mitra pebisnis.

A. Mitra pengguna

Mitra pengguna adalah mitra yang hanya memiliki hak pakai atau mengambil manfaat dari penggunaan produk VSI saja. Ada beberapa syarat untuk menjadi mitra pengguna yaitu:⁶⁴

1. Membeli kartu perdana seharga Rp. 25.000,- (KP25).
2. Mampu mendaftarkan diri secara online atau dapat juga dibantu oleh mitra pebisnis lainnya dengan ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan proses pendaftaran (yang telah tertulis pada kode etik perusahaan).
3. Tidak dapat turut menjual produk Paytren seperti halnya mitra pebisnis.
4. Tidak dapat membentuk komunitas baik itu sendiri atau dibantu oleh mitra pebisnis lainnya. Beberapa fasilitas yang didapat mitra pengguna diantaranya:
 - a. Mendapatkan nomor identifikasi (Nomor ID) kemitraan, username, pin transaksi dan deposit senilai Rp. 15.000,- (langsung setelah aktivasi berhasil).
 - b. Dapat menjalankan fitur dengan fungsi terbatas, yaitu hanya transaksi pembelian pulsa prabayar dan voucher game melalui aplikasi android “Paytren” yang diperoleh dari Playstore, bisa juga bertransaksi melalui Yahoo Messenger, Gtalk atau SMS.

⁶⁴ Starter PT. Veritra Sentosa Internasional, diperoleh pada 17 November 2014. Hlm.2

- c. Mendapatkan cashback dari transaksi pribadi selama 10 hari sejak aktivasi.
- d. Maksimal deposit Rp.10.000,- per hari dan maksimal deposit mengendap Rp. 1.000.000,- dengan maksimal transaksi Rp. 11.000.000,- per hari atau Rp. 4.000.000,-per bulan
- e. Berlaku selamanya.
- f. Setelah memenuhi syarat diatas calon mitra pengguna dapat mulai bergabung sebagai mitra dengan tiga cara sebagai berikut: ⁶⁵
 - 1. Calon mitra harus membeli KP25
 - 2. Calon mitra harus mengaktifasi KP25.
 - 3. Calon mitra harus melakukan pembelian Deposit.

Setelah menjadi mitra pengguna seorang mitra diberi fasilitas sebagai berikut:⁶⁶

- a. Dapat melakukan pembelian pulsa Handphone atau voucher game melalui SMS, Gtalk, maupun Yahoo Messenger.
- b. Berhak mendapatkan deposit secara langsung sebesar Rp. 15.000,- yang langsung dapat digunakan untuk bertransaksi.
- c. Berhak atas ju'alah cashback pribadi dari setiap pembelian pribadi yang berlaku selama 10 hari sejak tanggal aktivasi (perhitungan perbulan, jadi transaksi tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan dari bulan berjalan, dibayarkan bulanan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

⁶⁵KP25 adalah kartu perdana yang bersaldo Rp. 25.000,00- wawancara dengan Wisnu Erri sebagai mitra paytren.

⁶⁶Starterkit PT. VSI, 2014, Ibid.

- d. Pada hari ke-11 setelah aktivasi, perusahaan menghentikan *ju'alah* cashback pribadi namun mitra tetap dapat melakukan pembelian pulsa Handphone atau voucher game selama deposit mencukupi.
- e. Log transaksi, riwayat transaksi, riwayat deposit, daftar harga, dan info terbaru dapat dilihat di www.mytreni.com menggunakan username dan pin yang diberikan saat aktivasi.
- f. Fasilitas lain seperti penggunaan aplikasi android, pembayaran PLN, Telkom, PDAM, lain-lain hanya bisa diperoleh jika mitra meningkatkan status kemitraannya menjadi mitra dengan lisensi penuh (Mitra Pebisnis) dengan cara *Upgrade Lisensi*.
- g. Seluruh mitra dikenakan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 1.000,-/bulan terkecuali apabila mitra tersebut melakukan transaksi minimal 1 kali dalam 1 bulan.

B. Mitra Pebisnis

Mitra pebisnis merupakan mitra yang diberi hak lain selain yang didapat mitra pengguna, yaitu dapat turut menjual dan atau memasarkan produk dari perusahaan PT. VSI. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi saat akan menjadi Mitra Pebisnis, yaitu:⁶⁷

1. Sudah menjadi mitra pengguna.
2. Tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) hak usaha dan wajib meng-upload (ke web resmi perusahaan) bukti pengenalan berupa F/C berwarna (scan)

⁶⁷Kode Etik Mitra paytren PT. Veritra Sentosa Internasional, 2014.

dari KTP/Passport/SIM yang sah dan masih berlaku untuk diverifikasi secara manual oleh perusahaan.

3. Wajib melengkapi profil pribadi sesuai dengan tanda pengenal yang digunakan dalam pendaftaran.
4. Wajib mengisi data bank yang sesuai dengan profil pribadi, jika tidak sesuai maka wajib menyertakan surat kuasa asli bermaterai yang menerangkan dengan jelas persetujuan penggunaan rekening bagi kepentingan mitra pebisnis yang bersangkutan dilampirkan dengan fotocopy berwarna (scan) KTP/Passport/SIM yang sah dan masih berlaku dari kedua belah pihak.
5. Wajib mempelajari rencana bisnis/pemasaran dan produk perusahaan baik mandiri maupun mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan perusahaan serta mengikuti seluruh perkembangan juga perubahan dari perusahaan melalui mitra pebisnis pendahuluannya (*upline* satu jaringannya) ataupun melalui situs/social media resmi seperti: www.paytren.co.id www.treni.co.id Paytren Official (fb/twitter) dan lain lain sesuai perkembangan dari perusahaan.

Sebelum kita memulai menjadi Pebisnis yang menjual produk Paytren ini, tentunya kita harus mengenal sistem benefit dari seorang pebisnis yang menjual Paytren. Ketika kita menjadi Mitra Pebisnis dan menyetujui kesepakatan menjadi mitra pebisnis dengan membeli lisensi Paytren yang diinginkan untuk mengembangkan bisnisnya. Maka kita mendapatkan komisi dari Royalti dari Treni.

Rencana Bisnis/ Pemasaran

Veritra Sentosa Internasional (treni) adalah perusahaan yang memasarkan “Lisensi” penggunaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak/Teknologi bernama “Paytren” dengan metode jaringan pemasaran yang dikembangkan melalui kerjasama kemitraan atau mitra usaha, metode pemasaran tersebut juga dikenal dengan istilah *Direct Selling* atau penjualan langsung (rujukan definisi: Permendag 32/M-DAG/PER/8/2008, Ketentuan Umum, Bab 1, Pasal 1).

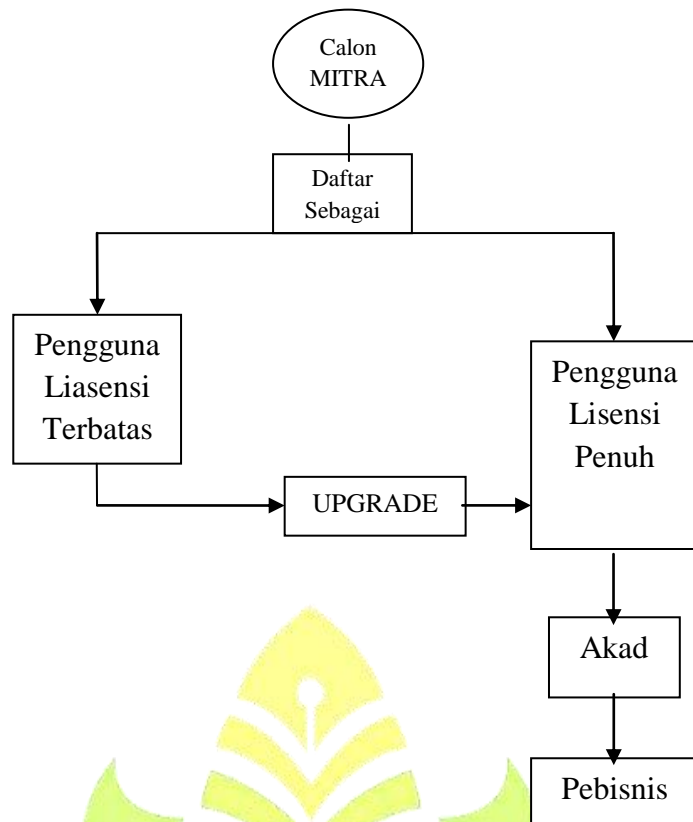
Model Kemitraan

PT Veritra Sentosa Internasional (treni) menawarkan bentuk kerjasama sebagai berikut:

1. Pengguna Lisensi Terbatas
2. Pengguna Lisensi Penuh
3. Pebisnis



Tahapan Upgrade Lisensi



Benefit Pebisnis

1. Komisi/ Samsarah Penjualan Langsung (referral)

Perusahaan akan memberikan komisi penjualan langsung kepada pebisnis yang berhasil menjual paket lisensi penuh sebesar Rp.75.000,- yang terbagi atas 60% tunai dan 40% *top up deposit*.

Ju'alah/komisi ini diberikan oleh Treni kepada Mitra Pebisnis yang menjualkan Paytren sebagai komisi yang telah disepakati ketika akad antara Mitra Pebisnis dengan PT. Veritra Sentosa Internasional yang dimana saling menguntungkan ke dua belah pihak. Besarnya berbanding lurus dengan hasil atau besarnya omset yang dicapai Mitra Bisnis sehingga TRENI berhak memberikan Komisi yang sesuai dengan kesepakatan/ akad.

2. Komisi/Ujrah Leadership

Perusahaan akan memberikan komisi Leadership sebesar Rp.25.000,- (yang terbagi atas 60% tunai dan 40% top up deposit) untuk setiap pertumbuhan 1 pebisnis baru pada masing-masing grup (maksimal 2 grup, kiri dan kanan).

3. Promo komisi/Ujrah Pengembangan Penjualan Langsung

Perusahaan akan memberikan komisi pengembangan penjualan sebesar Rp.2.000,- per lisensi (maksimum 10 turunan/generasi apabila:

- Pebisnis yang direferensikan membeli selain lisensi basic atau
- Pebisnis yang direferensikan berhasil menjual paket lisensi penuh.

4. Komisi/ Ujrah Pengembangan Komunitas

Perusahaan memberikan komisi pengembangan komunitas sebesar Rp.1.000,- apabila pebisnis yang direferensikan (maksimal 10 turunan/generasi) berhasil mendapatkan komisi leadership.

5. Cashback Transaksi

Perusahaan membagikan persentase keuntungan *fee* berupa cashback yang diperoleh dari setiap transaksi pribadi (yang dilakukan pengguna maupun pebisnis) dan transaksi pribadi minimal 1x/bulan.

D. SISTEM BAGI HASIL di KALANGAN PEMAKAI PAYTREN KECAMATAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG

Mencermati pengertian dari terminologi disekitar pola kemitraan dalam tatanan konsep, dapat diambil suatu pemahaman praktis bahwa arti yang luas dari sistem dan pola kemitraan antara pihak pemodal/inti dengan mitra Paytren adalah suatu kerjasama yang dapat menguntungkan satu sama lainnya.

Sehingga dapat memberikan suatu sistem kerja yang baru dalam masyarakat, khususnya para pengguna atau mitra Paytren kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

Apa yang terdapat dalam skripsi ini menggambarkan upaya manusia dalam interaksi sosial dalam melakukan kerjasama dengan orientasi bisnis. Pihak pengguna atau mitra Paytren selaku pihak inti mendaftarkan menjadi pengguna sebagai pebisnis dengan status mitra Paytren yang tujuannya mencari keuntungan dalam berbisnis.

Kegiatan bagi hasil di aplikasi Paytren di kecamatan Sukarame Bandar Lampung ini sama sistemnya dengan daerah-daerah lainnya, ketika kita ingin menjadi Mitra Pebisnis dan menyetujui kesepakatan menjadi mitra pebisnis dengan membeli lisensi Paytren yang diinginkan untuk mengembangkan bisnisnya

Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa mereka ke calon pembeli/konsumen dari seluruh dunia. Hadirnya aplikasi ini memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antara perusahaan kecil, menengah dan besar dalam merebut angka pasar, dengan aplikasi paytren ini maka akan menguntungkan banyak pihak.⁶⁸

Modal untuk mendaftarkan diri sebagai pebisnis aplikasi Paytren sesuai calon mitra Paytren dengan membeli lisensi yang diinginkan untuk

⁶⁸ Wawancara Bapak Ismail Laily sebagai Mitra Paytren pada tanggal 27 Oktober 2018.

mengembangkan bisnisnya, lisensi adalah hak akses untuk menggunakan fasilitas Paytren mulai dari fitur-fitur transaksi, program unggulan termasuk hak untuk menjalankan bisnisnya. Jadi sebagian orang tidak keberatan dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.⁶⁹

Untuk mendapatkan komisi pada dasarnya tergantung pada usaha mitra itu sendiri dengan mengembangkan bisnisnya, karena ada berbagai cara untuk mendapatkan komisi atau bonus dari perusahaan tersebut tergantung dari pengguna aplikasi paytren yang menjalankan usahanya.⁷⁰

Jadi di aplikasi paytren memiliki 2 paket lisensi, berikut adalah paket lisensi Paytren terbaru:⁷¹

1. Paket BASIC (1 lisensi)

Harga 1 lisensi yaitu Rp. 350.000,-

- Deposit perdana: Rp. 15.000,-
- Produk: paytren, 2 point promo yang bisa ditukar dengan 1 botol Habs-Pro, atau buku ustad Yusuf Mansur.
- Kuota deposit maksimal: Rp. 5.000.000,-
- Limit transaksi: Rp. 20.000.000,-/bulan
- Potensi komisi:Rp. 300.000,-/hari atau Rp. 9.000.000,-/bulan.
- Reward: berkesempatan mendapatkan hanya 1 kali: Smartphone, tour Singapura/Notebook, motor, umrah, mobil keluarga, mobil mewah, Apartemen, Rumah mewah, dll.

⁶⁹ Wawancara Ibu Neni Nur sebagai Mitra Paytren pada tanggal 29 juli 2018.

⁷⁰ Wawancara Bapak Sulyasman sebagai Mitra Paytren pada tanggal 28 Oktober 2018.

⁷¹ <http://Paytrenregistrasi.com/harga.Lisense/Paytren/>

2. Paket TITANIUM (31 Lisensi)

Pembelian 31 lisensi Rp. 10.075.000,-

- Deposit awal: Rp. 2.390.000,- / atau dapat ditukar dengan booking seat umrah senilai Rp. 3.500.000,-
- Produk: aplikasi Paytren, 62 point promo yang dapat ditukar dengan 1 unit Smartphone atau Al-Quran Digital (E-PEN).
- Kuota deposit maksimal ; Rp. 155.000.000,-
- Limit transaksi: Rp. 50.000.000,-/bulan.
- Potensi komisi; Rp. 9.300.000,-/hari atau Rp. 279.000.000,-/ bulan
- Reward: berkesempatan mendapatkan 31 kali: Smartphone, Notebook. Motor, umrah, mobil, rumah mewah, Apartement.
- Bisa menjalankan bisnis umroh.
- Ada group bimbingan khusus.

Dalam bagi hasil yang didapatkan setelah menjalankan bisnis di aplikasi Paytren ini, berikut hasil yang didapatkan dari menjalankan bisnis Paytren:⁷²

1. Komisi/Samsarah Penjualan Langsung (referral)

Perusahaan akan memberikan komisi penjualan langsung kepada pebisnis yang berhasil menjual paket lisensi penuh sebesar Rp.75.000,- yang terbagi atas 60% tunai dan 40% *top up deposit*.

2. Komisi/Ujrah Leadership

Perusahaan akan memberikan komisi Leadership sebesar Rp.25.000,- (yang terbagi atas 60% tunai dan 40% *top up deposit*) untuk setiap

⁷²www.Paytren.co.id-rencanapemasaranpaytren.hlm5.

pertumbuhan 1 pebisnis baru pada masing-masing grup (maksimal 2 grup, kiri dan kanan).

3. Promo komisi/ Ujrah Pengembangan Penjualan Langsung

Perusahaan akan memberikan komisi pengembangan penjualan sebesar Rp.2.000,- per lisensi (maksimum 10 turunan/generasi apabila:

- Pebisnis yang direferensikan membeli selain lisensi basic atau
- Pebisnis yang direferensikan berhasil menjual paket lisensi penuh.

4. Komisi/ Ujrah Pengembangan Komunitas

Perusahaan memberikan komisi pengembangan komunitas sebesar Rp.1.000,- apabila pebisnis yang direferensikan (maksimal 10 turunan/generasi) berhasil mendapatkan komisi leadership.

5. Cashback Transaksi

Perusahaan membagikan persentase keuntungan *fee* berupa cashback yang diperoleh dari setiap transaksi pribadi (yang dilakukan pengguna maupun pebisnis) dan transaksi pribadi minimal 1x/bulan.

cashback yang di dapatkan dari transaksi yang kita lakukan, berikut adalah produk-produk dari paytren:

- a. Voucher pulsa baik regular maupun data.
- b. Voucher games seperti Lyto, Megaxus, Mycard, dan masih banyak lagi.
- c. Token PLN.
- d. Tagihan TV Prabayar.
- e. Tagihan PLN.
- f. Tagihan PDAM.

- g. Tagihan Telkom.
- h. Tagihan jasa keuangan.
- i. Tagihan BPJS KES.
- j. Pembelian tiket pesawat.
- k. Pembelian tiket kereta.

keuntungan terbesar untuk mendapatkan komisi dari perusahaan yakni dari penjualan langsung yang bisa dilakukan jarak sejauh apapun posisi kita, karena menjual lisensi bisa dilakukan dengan *online* maka penjualan ini bisa dilakukan di beberapa kota bahkan negara, serta calon mitra paytren juga bisa digunakan atau dibeli oleh semua orang tanpa mengenal usia. Serta dari penjualan segala kebutuhan masyarakat yang bisa dilakukan dari aplikasi Paytren dan kebanyakan dari pengguna aplikasi tersebut hanya menjual lisensi untuk mendapatkan komisi atau bonus karena bonus dari penjualan lisensi itu cukup besar dibandingkan penjualan produknya.⁷³

Jadi pengguna Paytren Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ini lebih mengutamakan untuk melakukan penjualan lisensi/menjual lisensi dari pada untuk menjual produk-produk, karena dilihat dari keuntungan terbesarnya dari perusahaan yakni dari penjualan langsung.

Pengguna Paytren baru akan mendapatkan komisi apabila telah melakukan penjualan, sedangkan bisnis yang menggunakan sistem MLM ini diatur oleh Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan

⁷³ Wawancara Bapak Muhtar Arifin sebagai mitra Paytren pada tanggal 28 oktober 2018.

yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.

E. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KEPADA ANGGOTA PAYTREN DI SUKARAME BANDAR LAMPUNG

a. Kelebihan

Keuntungan menggunakan Paytren tidak hanya dari fungsinya saja, akan tetapi Paytren memiliki kebijakan yang bisa menguntungkan bagi yang menggunakan Paytren, yaitu komisi dan bonus di setiap transaksi apa saja yang anda lakukan, tidak banyak memang banyak memang hanya Rp.75,- pertransaksi yang anda lakukan, tapi anda harus catat harga pulsa, listrik dll sedikit lebih murah dari penjual jasa transaksi lainnya, dan jika dibandingkan dengan anda harus pergi ke loket pembayaran apalagi harus mengantri menyita banyak waktu juga tenaga jika menggunakan Paytren anda hanya tinggal klik-klik saja dan akan mendapat cashback dan juga bonus.

Tentu saja jika ditawarkan masyarakat tentunya lebih memilih agar bisa membayar tagihan lewat smartphone dari pada harus datang dan antri di lokasi pembayaran. Hal ini membuat aplikasi bisnis pembayaran jadi aplikasi yang populer.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara Ibu Neni Nur sebagai mitra Paytren pada tanggal 29 April 2018.

Diantara aplikasi sejenis, tentu saja Paytren memiliki kelebihan tersendiri. Berikut ini adalah kelebihan Paytren:

1. Produk beragam jenis.

Paytren memiliki produk yang beragam diantaranya:

- a. Voucher pulsa baik regular maupun data.
- b. Voucher games seperti Lyto, Megaxus, Mycard, dan masih banyak lagi.
- c. Token PLN.
- d. Tagihan TV prabayar.
- e. Tagihan PLN.
- f. Tagihan PDAM.
- g. Tagihan Telkom.
- h. Tagihan jasa keuangan.
- i. Tagihan BPJS KES.
- j. Pembelian tiket pesawat.
- k. Pembelian tiket kereta.

- 2. Mendapatkan penghasilan tambahan seumur hidup.
- 3. Dapat bonus sponsor Rp. 75.000,- tiap mengajak 1 orang bergabung.
- 4. Dapat bonus pasangan Rp. 25.000,- tiap terjadi 1 pasangan.
- 5. Dapat bonus duplikasi Rp.1000,- tiap terjadi 1 duplikasi di jaringan.
- 6. Dapat bonus generasi sebesar Rp.2000,- per lisensi dari perkembangan mitra di jaringan sampai kedalaman 10 generasi.

7. Dapat bonus transaksi Rp.50 – Rp. 100 tiap 1 transaksi *downline*, sampai 10 generasi.
8. Dapat cashback Rp. 75,- tiap transaksi pulsa pribadi.
9. Dapat cashback Rp. 100 - Rp. 1000 tiap transaksi PPOB pribadi.
10. Lebih hemat jika pakai pulsa sendiri.
11. Lebih mudah dalam berbagai transaksi karena semua dalam paytren di hp anda.
12. Dapat Produk Promo Perdana (Np2).
13. Dapat ID Mitra keanggotaan, link Replika atas nama anda dari web resmi (gratis, bisa anda gunakan seumur hidup).
14. Dapat ilmu agama rutin dari ustad Yusuf Mansur dari aplikasi Paytren.
15. Dapat reward bagi yang berprestasi (HP, Tour, Haji, Mobil mewah, rumah mewah).
16. Dapat aplikasi paytren yang canggih.
17. Dapat berjual beli disitus virtual (Belanjaqu.co.id).
18. Bisa buka loket pembayaran.
19. Memiliki penghasilan terus menerus (Rekening hidup).
20. Berbisnis sambil menambah ilmu agama, karena setiap transaksi anda di Paytren bernilai sedekah.
21. Setiap mitra paytren akan mendapatkan kartu virtual/ kartu paytren, semacam kartu ATM dengan nama anda tertera di kartu tersebut.
22. Setiap mitra mendapatkan fasilitas DOKU, yakni pembayaran diseluruh gerai Alfamart, transfer ke bank.

23. Asuransi paytren, mitra dapat menikmati asuransi syariah dengan lebih mudah dan berpotensi mendapat income tambahan dari bisnis asuransi syariah.
24. Bisa transaksi menggunakan Pay by QR (scan barcode).
25. Mendaftarkan diri mitra grab gratis.
26. Mendaftarkan mitra grab dengan komisi hingga Rp. 350.000,-.
27. Mitra Paytren dapat melakukan transfer saldo dengan pengguna lain, berbeda dengan server pulsa biasa yang hanya bisa transfer saldo ke *downline*.
28. Mitra Paytren dapat dengan mudah melakukan sedekah, aqiqah, dan qurban dengan saldo yang dimiliki.
29. Setiap melakukan transaksi otomatis telah bersedekah.
30. Kita akan mendapatkan cashback yang diakumulasi dan ditambahkan pada saldo Paytren.
31. Akun Paytren tidak akan kadaluwarsa.
32. Akun Paytren kita dapat diwariskan.
33. Dengan mengaktifkan Paytren Messenger seharga Rp. 35.000,- kita dapat sharing dengan sesama mitra Paytren.
34. Dengan memanfaatkan aplikasi pihak ketiga yaitu Doku, saldo ePin dapat ditarik tunai melalui rekening bank ataupun gerai (misal Alfamart). Selain itu, bisa digunakan untuk membayar belanja di gerai tersebut.

35. Dengan menjadi mitra Paytren, sobat pembaca berhak mendapatkan 6 macam bonus mitra.
36. Mitra Paytren otomatis memiliki rekening Virtual Account BNI syariah yang bisa digunakan untuk deposit tanpa menggunakan sistem tiket.
37. Di merchant tertentu yang sudah mengadakan kerja sama dengan Paytren, mitra dapat memanfaatkan fitur Pay by QR untuk melakukan pembayaran menggunakan saldo Paytren.
38. Mitra Paytren bisa melakukan top up atau deposit di merchant (Alfamart).⁷⁵

b. Kekurangan

Keluhan masalah pelayanan juga hal yang sering dikeluhkan beberapa mitra Paytren dimana mereka merasa kurang puas dengan pelayanan yang tidak terlalu cepat. Dimana kadang membutuhkan beberapa hari hanya untuk verifikasi kartu KTP. Biasanya ini dikarenakan admin maupun cs yang terlalu sibuk hingga tidak lagi bisa menyegerakan semua pelayanan yang mereka tanggapikan setiap harinya. Karena Paytren sekarang ini termasuk salah satu bisnis yang cukup populer. Bayangkan saja beberapa cs maupun admin yang harus bekerja melayani berbagai macam keluhan yang dikeluhkan oleh mitra Paytren yang jumlahnya sudah sangat banyak tersebut. Tentunya mereka akan butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan satu persatu.

⁷⁵Wawancara dengan ibu Wasilatu Rofiqoh sebagai Mitra Paytren tanggal 10 mei 2018.

Seperti halnya beberapa aplikasi sistem transaksi *online* lainnya, terkadang ada masalah kesalahan sistem atau server yang sedang *down* yang akan mengakibatkan keterlambatan proses transaksi. Seperti halnya waktu menunggu yang cenderung agak lama jika anda mengisi pulsa dengan nominal berbeda untuk nomor yang sama. Tapi masalah ini tidak akan selalu terjadi, biasanya hanya akan terjadi pada masa-masa tertentu ketika server terlalu sibuk atau sedang *down*. Bahkan aplikasi ini juga bisa mengalami *crash* atau *error* hanya karena kesalahan sistem atau memori smartphone yang terlalu penuh.

Selain itu harga yang ditawarkan akan otomatis lebih mahal ketimbang dengan beberapa layanan yang lainnya. Namun ini kembali lagi pada pemahaman disetiap penggunaanya. Karena biaya transaksi yang digunakan disetiap transaksi disini otomatis akan dijadikan sebagai sumber sedekah dan tentunya jika anda tidak mempermasalahkannya dan ikhlas akan menjadi sebuah lading pahala, bukan? Ya, tidak sedikit mitra Paytren yang tidak mempermasalahkan perbedaan harga yang relative lebih besar disistem Paytren tersebut. Karena juga seseorang paham betul akan konsep sedekah maka biasanya perbedaan harga ini tidak menjadi permasalahan. Namun ada juga yang tidak sependapat banyak dari calon mitra yang terhalang untuk mendaftarkan diri karena harga yang ditawarkan cukup mahal, calon mitra khawatir apabila uang mereka tidak balik modal.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara Bapak Heri Septiana Mitra Paytren pada tanggal 27 oktober 2018.

Harga pendaftaran sebagai member yang terbilang lumayan besar dan cukup mahal. Paytren sendiri memberikan dua jenis lisensi jika anda ingin menjadi membernya yaitu titanium yang harus membayar uang lisensi sebesar Rp. 10.100.000,- dan basic sebanyak Rp. 350.000,-. Bagi sebagian orang ini tentunya uang lisensi dan pendaftaran yang terbilang cukup besar. Karena tidak jarang banyak aplikasi serupa yang memberikan kenyamanan lebih baik dalam pendaftaran sebagai member tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar.



BAB IV

ANALISA DATA

A. Praktek Pembagian Komisi pada Pengguna Aplikasi Paytren

Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa: komisi adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada para mitra atas hasil penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja yang berkaitan langsung dengan penjualan barang dan jasa. Sedangkan bonus adalah tambahan dari perusahaan kepada mitra sebagai imbalan atas penjualan sebab mitra telah berhasil melampaui target penjualan produk barang atau jasa.

Mencermati pengertian dan terminologi disekitar pola kemitraan dalam tatanan konsep, dapat diambil suatu pemahaman bahwa arti yang luas dari sistem dan pola kemitraan antara pihak pemodal atau mitra Paytren dengan pihak perusahaan adalah suatu kerjasama yang dapat menguntungkan satu sama lainnya. Sehingga dapat memberikan suatu sistem kerja yang baru dalam masyarakat, khususnya pada mitra Paytren Kecamatan Sukarame Bandarlampung.

Skripsi ini menggambarkan manusia dalam berinteraksi sosial dalam melakukan kerjasama dalam bisnis ini. Pihak mitra selaku pihak inti memberikan modal kepada perusahaan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan kepada calon mitra yang ingin menjadi anggota mitra Paytren untuk memperoleh keuntungan atau komisi yang dijanjikan.

PT. Veritra Sentosa Internasional juga mempunyai komisi maupun bonus bagi mitra-mitranya. Komisi ini terbagi menjadi lima, diantaranya:⁷⁷

1. Komisi/Samsarah Penjualan Langsung (referral)
2. Komisi/Ujrah Leadership
3. Promo komisi/Ujrah Pengembangan Penjualan Langsung
4. Komisi/Ujrah Pengembangan Komunitas
5. Cashback Transaksi

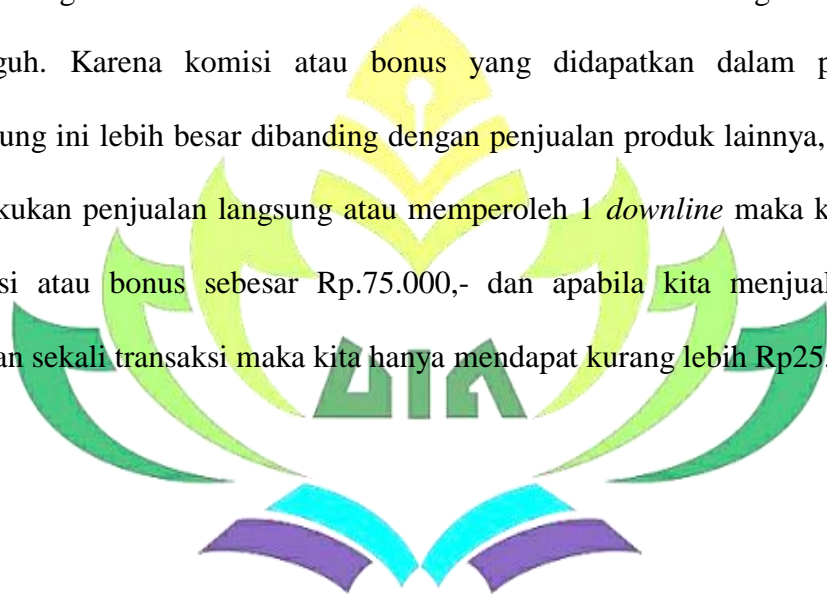
Dalam sistem pembagian komisi yang dilakukan oleh mitra Paytren apabila ingin mendapatkan semua komisi yang terdapat di aplikasi tersebut, maka kita harus melakukan penjualan-penjualan yang ada di aplikasi Paytren. Jadi imbalan yang diberikan perusahaan kepada para mitra atas hasil penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja yang berkaitan langsung dengan penjualan barang dan jasa.

Modal yang kita keluarkan untuk membeli lisensi agar menjadi mitra pebisnis di aplikasi Paytren ini tergantung dengan paket yang diinginkan, jadi semakin banyak lisensi yang kita miliki semakin banyak pula pendapatan kita atau komisi yang kita dapatkan disetiap transaksi yang kita lakukan. Jadi apabila kita membeli paket Basic dengan harga Rp.350.000,- maka lisensi yang kita dapatkan 1 lisensi dan apabila kita membeli paket Titanium dengan harga Rp.10.000.000,- maka kita mendapatkan 31 lisensi. Yang masing-masing dari paket tersebut mendapatkan fasilitas yang berbeda dan tentunya

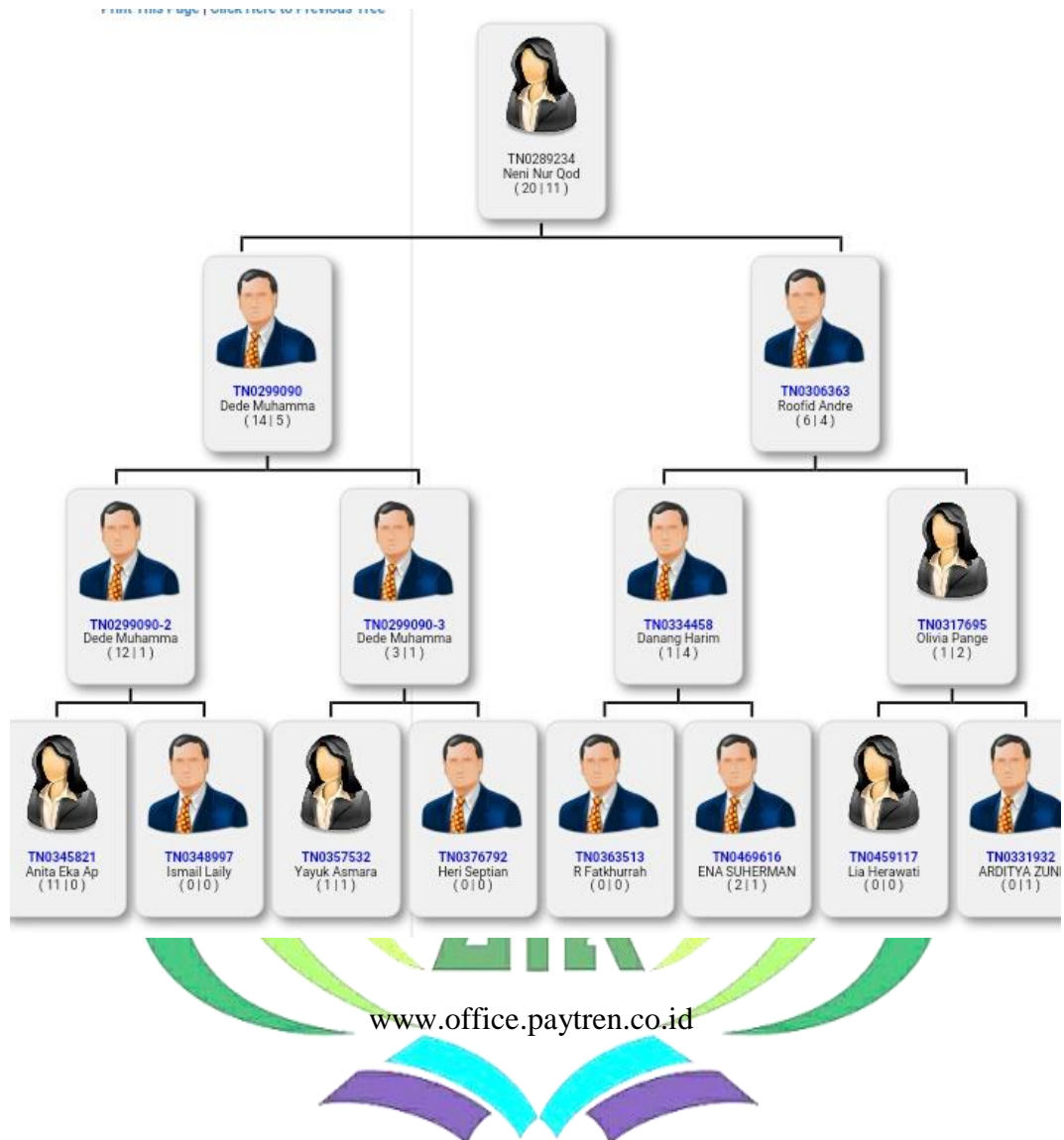
⁷⁷www.paytren.co.id-rencanapemasaranpaytren, hlm.5.

mendapatkan komisi atau bonus yang berbeda. Selain mendapat komisi diatas mitra juga mendapatkan *reward* jika berhasil melampaui batas menyeimbangkan grupnya. *Reward* mitra ini didapat jika mitra berhasil mendapatkan *downline* sejumlah yang telah ditentukan perusahaan.

Jadi sistem yang dilakukan dalam pembagian komisi yang dilakukan oleh mitra Paytren Kecamatan Sukarame Bandarlampung, mereka lebih memilih dengan melakukan penjualan langsung atau merekrut *downline* dengan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan komisi atau bonus dan tidak mementingkan atau tidak membina *downline* mereka dengan sungguh-sungguh. Karena komisi atau bonus yang didapatkan dalam penjualan langsung ini lebih besar dibanding dengan penjualan produk lainnya, jika kita melakukan penjualan langsung atau memperoleh 1 *downline* maka kita dapat komisi atau bonus sebesar Rp.75.000,- dan apabila kita menjual produk dengan sekali transaksi maka kita hanya mendapat kurang lebih Rp25,-.



Praktek kemitraan Paytren



B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Sistem Pembagian Komisi pada Pengguna Aplikasi Paytren

Al-ji'alah (dibaca dengan mengkasraahkan huruf jim) atau *al-ju'alah* (dibaca dengan mendhammahkan huruf jim) yang disamakan dengan *payment* and *wages* dalam bahasa inggris, atau *prime* dan *indemnity* dalam bahasa Prancis. Jamaknya *aj'al* adalah sesuatu yang dijadikan atau tepatnya yang ditentukan diatas pekerjaan (ma-yuj' alu 'ala al-'amal).⁷⁸ Menurut sebagian ahli, kata *ji'alah* sesungguhnya lebih umum sifatnya dari pada kata *ujrah* yang bersifat spesifik. *Al-ji'alah* artinya pengikatan penggantian/imbalan yang diketahui/ditentukan (jumlahnya) terhadap pekerjaan (prestasi) tertentu dengan berdasarkan analisa kemampuan si pekerja dan kepuasan pemesan kerja/ jasa. Dalam istilah teknis, kata *ju'lun* bisa juga diartikan dengan komisi 'umulah hadiah *ja'izah* dan/atau tanda jasa *mukafa'ah* dan lain-lain, bisa jadi termasuk bonus *idhafah/ ikrmiiyyah*.⁷⁹

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa No.62/DSN-MUI/XII/2007, menformulasikan demikian: "*ju'alah* adalah janji atau komitmen *iltizam* untuk, memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'i) tertentu atas pencapaian hasil *natijah* yang ditentukan."⁸⁰ Pihak yang menjanjikan imbalan/pembayaran disebut *ja'il*, orang/pihak yang mengerjakan *ji'alah* disebut *maj'ul lah*, sedangkan objek yang diakadkan para pihak disebut

⁷⁸ Ali Mutahar, *kamus muthahar Arab-Indonesia*, hlm. 400.

⁷⁹ Pro. DR. H. Muhammad Amin Suma, *Muzakarah Cendikiawan Syariah Nusantara Ke-7 (Ujrah Dalam Bentuk Bayaran Insentif Pasif Berdasarkan Prestasi Kerja (Performance Fee) Dalam Keuangan Islam*, 2013. Hlm. 6.

⁸⁰ Dewan Syariah Nasional MUI dan bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, 2010 M/ 1432 H, jil. 2, hlm.96

maj'ul'alaih/mahal al'aqd. Akad *ji'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi keperluan pelayanan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan *muthlaq altasharruf* untuk melakukan akad ;
- b. Objek *ji'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
- c. Hasil pekerjaan *natijah* sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
- d. Imbalan *ji'alah* (*reward/ iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ji'alah*).⁸¹

Menurut Syaikh Dr.'Abdullah bin Nashir As-Sulmi menerangkan mengenai syarat MLM yang halal.

1. Orang yang ingin memasarkan produk tidak diharuskan untuk membeli produk tersebut
2. Harga produk yang dipasarkan dengan sistem MLM tidak boleh lebih mahal dari pada harga wajar untuk produk sejenis. Hanya ada dua pilihan harga semisal dengan harga produk sejenis atau malah lebih murah.
3. Orang yang ingin memasarkan produk tersebut tidak disyaratkan harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi anggota.

⁸¹ *Ibid*. Hlm. 97

Jika tiga syarat ini bisa dipenuhi maka sistem MLM yang diterapkan adalah sistem yang tidak melanggar syariat.

Dari uraian sebelumnya dapat penulis analisis berdasarkan hukum Islam terhadap pembagian komisi yang menggunakan sistem Multi Level Marketing berdasarkan rukun dan syarat *mudharabah*/bagi hasil. Seperti yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa rukun dan syarat yang terpenuhi, namun ada juga syarat dan rukun yang kurang terpenuhi dalam *mudharabah* ini Seperti:

1. Dalam prakteknya masih banyak mitra paytren yang hanya mementingkan *downline* saja, mereka hanya mengutamakan perekrutan anggota baru kemudian para anggota itu dibiarkan begitu saja. Hal ini antara lain dikarenakan perusahaan hanya memerlukan uang iuran pendaftaran dari setiap mitra atau member yang bergabung. Karena itu seorang *upline* harus memberikan pembinaan terlebih dahulu kepada *downline*. Dengan penjelasan ini maka salah satu indikator MLM syariah adalah bagaimana para member yang menjadi anggota terlebih dahulu atau *upline* memberikan kepedulian dan bimbingan yang maksimal member baru atau kepada *downline*. Hal ini akan menjadi positif jika pembinaan yang dilakukan oleh mereka mendapatkan dukungan sepenuhnya dan dikontrol secara baik dipihak perusahaan. Dalam bisnis MLM, setiap orang akan mendapatkan bimbingan langsung dari *upline* yaitu rekan kerja yang telah mengajak seseorang untuk menekuni usaha MLM, serta membimbing saat

menjalankan bisnis ini. Dilihat dari ciri-ciri bisnis MLM yang baik dan sehat yaitu:

- a. Memiliki produk atau jasa untuk dijual.
- b. *Upline* mau membantu *Downline* untuk berkembang.
- c. Memiliki sistem yang adil bagi semua member.
- d. Harga produk yang dijual masuk akal.
- e. Memiliki badan hukum yang jelas.
- f. Memiliki support sistem yang baik.

Dalam suatu hadis rasul bersabda:

قال رسول الله عليه وسلم : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأُمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدُهُ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: bahwa rasulullah saw bersabda: setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin, (dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya). Seorang laki-laki adalah pemimpin di lingkungan keluarganya, (dan bertanggung jawab atas anggota keluarga yang dipimpin). Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suami dan anaknya. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. (HR. Muslim)

Dalam prakteknya memang banyak *money game* yang berkedok MLM, mereka hanya mengutamakan perekrutan anggota baru kemudian para anggota itu dibiarkan begitu saja. Dikhawatirkan jika perusahaan hanya memerlukan uang iuran pendaftaran dari setiap member yang

bergabung, yang demikian mungkin hanya berencana untuk tidak hidup dalam masa yang panjang, sehingga tidak perlu pembinaan.

Dengan penjelasan ini maka salah satu indikator MLM Syariah adalah bagaimana para member yang menjadi anggota lebih dulu memberikan kepedulian dan bimbingan yang maksimal kepada member yang masuk belakangan. Hal ini akan menjadi sangat positif jika pembinaan yang dilakukan oleh mereka mendapatkan dukungan yang sepenuhnya dari pihak perusahaan.

2. Dalam hal pemberian bonus atau komisi atas sponsor mitra pembisnis baru baik Basic maupun Titanium. Bonus yang diperoleh sebesar Rp. 75.000,- yang semata-mata adalah bonus sponsor dan tidak ada korelasinya dengan nilai penjualan atau volume penjualan suatu produk. Selain bonus di atas juga terdapat komisi leadership sejumlah Rp. 25.000,- dan komisi generasi sponsor Rp. 2000,-. Sebagaimana bisnis yang menggunakan sistem MLM ini diatur oleh Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa. Sementara dalam surat al baqarah 185 yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا

اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas hasil penelitian tentang pembagian komisi yang menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM) Paytren kecamatan Sukarame Bandar lampung, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Dalam praktek pembagian komisi yang menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM) Paytren kecamatan Sukarame Bandar lampung, yaitu praktek bagi hasil yang berlangsung ini yang telah menggunakan sistem MLM, dalam praktek ini kebanyakan dari mereka untuk memperoleh komisi hanya menitik beratkan pada *downline* nya saja untuk menjual lisensi atau merekrut mitra baru dan tidak memasarkan produk yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut dan *upline* tidak memberikan bimbingan kepada *downline* yang telah mendaftarkan lewat mitra tersebut. Hal ini cenderung akan merugikan salah satu pihak karena tidak ada binaan dari *upline*.
2. Dalam praktek pembagian komisi yang menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM) Paytren kecamatan Sukarame Bandar lampung telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Bahwa hukum Islam memandang persoalan tentang bagi hasil aplikasi Paytren yaitu diperbolehkan karena dalam bentuk kegiatan dan unsur-unsur perikatan terdapat pada akan

perjanjian yang cukup jelas dan melakukan akad *ji'alah* yang sesuai. Namun demikian ternyata ada kesenjangan hukum Islam dengan pelaksanaannya dan masih ada akad yang masih belum terpenuhi serta pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak sehingga memerlukan akad/perjanjian yang lebih jelas lagi.

B. SARAN

Sehubungan dengan skripsi ini, maka penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan akan berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. PT. VSI aplikasi Paytren Sukarame Bandar Lampung hendaknya dalam mengelola perusahaan agar dapat lebih profesional. Diantaranya adalah sumber daya manusia sebagai karyawan hendaknya orang-orang yang faham dengan bisnis MLM dan faham dengan hukum ekonomi syariah serta hukum positif yang mengatur MLM. Selain itu, PT. VSI diharapkan dapat menyempurnakan prosedur bagi hasil dan *ju'alah* agar sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.
2. Masyarakat muslim hendaknya didalam berbisnis senantiasa menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariah Islam, terutama bisnis yang menggunakan sistem MLM. Karena bisnis yang menggunakan sistem MLM terdapat beberapa hal yang rentan dengan praktek *gharar*, *maysir* dan *money game*.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum, Wr, Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Sudah berapa lama menjadi mitra paytren :

ID Mitra :

Menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Siti Rohmawati

NMP : 1421030244

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Muamalah

Semester : IX (Sembilan)

Benar telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Komisi Pada Aplikasi Paytren”** (Studi di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Bandar Lampung, 04 juni2018

Daftar pertanyaan Mitra Paytren

1. Sejak kapan saudara/i menjadi mitra Paytren?

2. Bagaimanakah proses perekrutan agar menjadi mitra Paytren?
3. Bagaimana sistem kemitraan saudara/i dengan pihak perusahaan?
4. Fasilitas apa yang saudara/i dapatkan diawal menjadi mitra Paytren?
5. Apa keuntungan yang saudara dapatkan setelah menjadi mitra Paytren?
6. Apa kerugian setelah saudara menjadi mitra Paytren?
7. Bagaimana sistem operasional dalam aplikasi Paytren?
8. Bagaimanakah menurut saudara/i proses pembagian komisi yang menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM)?
9. Bagaimanakah menurut saudara dengan harga pendaftaran yang ditawarkan menjadi mitra Paytren tersebut?
10. Apakah saudara/i telah melakukan pembinaan kepada *downline* atau yang mendaftarkanP kepada anda?

